



LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN:

**AKSELERASI PENGEMBANGAN KONSULTASI VIRTUAL OTONOMI DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MELALUI APLIKASI BERBASIS
METAVERSE**



PKN II ANGGATAN XXVIII TAHUN 2022

Drs. Madderemmeng, M.SI



LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II

Judul : Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse
Nama : Drs. Maddaremmeng, M.Si
NIP : 197009211991011001
Absensi : 07 (Kelas A/2)
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Unit Kerja : Kementerian Dalam Negeri

Disetujui diseminarkan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada Tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, Desember 2022

Coach



(Dr. Budur Latif, MT)
NIP. 196210041993032002

Mentor



(Dr. Akmal Malik, M.Si)
NIP. 197003161991011001

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



(Mohammad Rizal, SE, M.Si)
NIP. 19640817 199303 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II

Judul : Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse
Nama : Drs. Maddaremmeng, M.Si
NIP : 197009211991011001
Absensi : 07 (Kelas A/2)
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Unit Kerja : Kementerian Dalam Negeri

Telah diuji di depan Tim Penguji
Pada hari, tanggal Desember 2022

Jakarta, Desember 2022

Coach



(Dr. Budur Latif, MT)
NIP. 196210041993032002

Mentor



(Dr. Akmal Malik, M.Si)
NIP. 197003161991011001

(Narasumber/Penguji)



(Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, M.A)
NIP. 196211091989021001

**BERITA ACARA
SEMINAR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 08.00 s.d Selesai
Tempat : BPSDM Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

Judul : Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse
Nama : Drs. Maddaremmeng, M.Si
NIP : 197009211991011001
Absensi : 07 (Kelas A/2)
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Unit Kerja : Kementerian Dalam Negeri

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor dan Coach

Coach



Dr. Budur Latif, MT
NIP. 196210041993032002

Peserta



Drs. Maddaremmeng, M.Si
197009211991011001

Penguji



Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, M.A
NIP. 196211091989021001

Mentor



Dr. Akmal Malik, M.Si
NIP. 197003161991011001

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



(Mohammad Rizal, SE, M.Si)
NIP. 19640817 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME berkat rahmat dan hidayat-Nya, Laporan Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan judul Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse, sehingga dapat disajikan dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua Pihak yang ikut membantu mendukung penyelesaian Naskah LAP ini, kepada:

1. Bapak Drs. Akmal Malik, M.Si, selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Mentor Penulis
2. Seluruh Direktur Pada Lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri
3. Bapak selaku Coach
4. Bapak sebagai Penguji
5. Segenap Satuan Tugas dan para Widyaiswara
6. Tim Kerja Proyek Perubahan
7. Keluarga Besar yang selalu mendukung dalam segala hal
8. Rekan-rekan peserta pelatihan kepemimpinan tingkat II
9. Seluruh pihak yang telah mendukung Laporan Proyek Perubahan ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Laporan Proyek Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi, utamanya berkaitan erat dengan penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan mempersempit praktik politik transaksional.

Akhir kata, izinkan Penulis menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyajian naskah Proyek Perubahan ini. Penulis akan sangat berterimakasih apabila ada kritik, saran, dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap penyempurnaan selanjutnya.

Jakarta, 28 November 2022
Penulis,



Drs. Maddaremmeng, M.Si
NIP. 19700921199101 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Deskripsi Proyek Perubahan.....	1
1.2. Latar Belakang.....	2
1.3. Tujuan.....	14
1.4. Manfaat.....	15
1.5. Output dan Outcome.....	15
1.6. Tahapan Perubahan Rencana Strategis.....	16
2. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	21
2.1 Fokus Proyek Perubahan.....	21
2.2 Millestone Proyek Perubahan.....	21
2.3 Identifikasi Potensi Kendala dan Solusi.....	25
2.4 Faktor Kunci Keberhasilan.....	27
2.5 Identifikasi Stakeholders.....	28
2.6 Rencana Strategis Tata Kelola Proyek Perubahan.....	29
3. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	36
A. Capaian Output Milestone Jangka Pendek	36
3.1 Mengkomunikasikan rencana proyek perubahan kepada Bapak Dirjen Otda selaku mentor.....	33
3.2 Pembentukan Tim Pokja dan Tim Efektif	38

3.3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Penggunaan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.....	45
3.4	Penerbitan Surat Pemberitahuan Kepada Pemda Terkait Penggunaan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.....	47
3.5	Penetapan Standar Alur Pelayanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.....	51
3.6	Pengadaan Alat Pendukung Pelayanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.....	55
3.7	Dukungan Dan Komitmen Tertulis Dirjen Otda Dan Seluruh Direktorat Dalam Lingkup Ditjen Otda.....	58
3.8	Uji Coba Layanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Di Lingkup Ditjen Otda Kemendagri.....	61
B.	Capaian Output Milestone Jangka Menengah.....	64
3.9	Penetapan Pemkot Makassar Sebagai Daerah Percontohan Penggunaan Konsultasi Berbasis Metaverse	64
3.10	Penyiapan Ruang Khusus Penggunaan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.....	69
4.	PENUTUP.....	72
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Rekomendasi.....	73
4.3	Rencana Pengembangan Potensi Diri.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Indikator Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Indonesia.....	3
Tabel 2	: Indikator Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Singapura.....	3
Tabel 3	: World E-Development Ranking.....	3
Tabel 4	: Tabel Isu dan Penetapan Isu Metode USG.....	16
Tabel 5	: Analisis SWOT.....	17
Tabel 6	: Susunan dan Peran Aktor Yang Terlibat Dalam Penyusunan Proyek Perubahan.....	30
Tabel 7	: Daftar Kendala dan Solusi Persiapan Pelaksanaan KOVI OTDA Untuk Tahun Anggaran 2023.....	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Hubungan Keterkaitan Pelayanan Terpadu Berbasis Online.....	9
Bagan 2	: Organisasi Sebagai Sistem Terbuka.....	11
Bagan 3	: Alur Pikir Urgensi Proyek Perubahan.....	20
Bagan 4	: Peta Pemangku Kepentingan.....	29
Bagan 5	: Pola Komunikasi Modern dan Tradisional.....	47
Bagan 6	: Struktur Pemerintahan Elektronik Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tingginya Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi.....	5
Gambar 2: Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi Jabatan.....	5
Gambar 3: Rekapitulasi PNS Yang Terlibat Korupsi dalam Lingkup Kementerian/Lembaga.....	7
Gambar 4: Rekapitulasi PNS Yang Terlibat Korupsi dalam Lingkup Kementerian/Lembaga.....	8
Gambar 5: Paparan Awal Project Leader kepada Mentor terkait KOVI OTDA.....	33
Gambar 6: Deskripsi Proyek Perubahan Project Leader kepada Mentor terkait KOVI OTDA.....	34
Gambar 7: Konsultasi Project Leader kepada Mentor.....	34
Gambar 8: Undangan Rapat Pembentukan Tim Teknis.....	34
Gambar 9: Rapat Pembentukan Tim Teknis.....	37
Gambar 10: SK Tim Proyek Perubahan.....	40
Gambar 11: Perumusan Rencana Teknis Dalam Implementasi Proyek Perubahan.....	41
Gambar 12: Kerangka Acuan Kerja KOVI OTDA I.....	42
Gambar 13: Kerangka Acuan Kerja KOVI OTDA II.....	43
Gambar 14: Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KOVI OTDA II.....	44
Gambar 15: Surat Edaran Penggunaan KOVI OTDA.....	45
Gambar 16: Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA	49
Gambar 17: Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Tampilan Antar Muka Registrasi.....	50
Gambar 18: Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Tampilan Awal.....	50
Gambar 19: Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Pembuatan Akun.....	51
Gambar 20: Tampilan Beranda Awal KOVI OTDA.....	51
Gambar 21: Penyerahan Alat Oculus Kepada Direktur PDOD.....	53
Gambar 22: Penyerahan Alat Oculus Kepada Direktur FKKPD.....	53
Gambar 23: Penyerahan Alat Oculus Kepada Direktur FKDH.....	54
Gambar 24: Penyerahan Alat Oculus Kepada Direktur PHD.....	54
Gambar 25: Surat Dukungan Direktur FKKPD Penggunaan KOVI OTDA.....	56
Gambar 26: Surat Dukungan Direktur PDOD Penggunaan KOVI OTDA.....	57

Gambar 27: Uji coba internal I penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda.....	60
Gambar 28: Uji coba internal II penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda.....	60
Gambar 29: Uji coba internal III penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda.....	60
Gambar 30: Uji coba penggunaan I KOVI OTDA bersama Pemkot Makassar.....	63
Gambar 31: Uji coba penggunaan II KOVI OTDA bersama Pemkot Makassar.....	64
Gambar 32: Tampilan Ruang Metaverse I bersama Pemkot Makassar.....	64
Gambar 33: Tampilan Ruang Metaverse II bersama Pemkot Makassar.....	65
Gambar 35: Tampilan Ruang Metaverse III bersama Pemkot Makassar.....	65
Gambar 36: Ruangan Khusus I Penggunaan KOVI OTDA.....	67
Gambar 36: Ruangan Khusus II Penggunaan KOVI OTDA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada Pemerintah Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ditandai dengan banyaknya pengetahuan dan teknologi baru yang bisa di manfaatkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi dalam melakukan pengelolaan komunikasi yang berjalan semakin kompleks. Pekerjaan di kantor adalah contoh konkret dari sebuah komunikasi yang kompleks itu dengan melibatkan banyak orang, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Sistem informasi berbasis internet mendadak menjadi sebuah *trend* saat pandemi Covid-19. Sistem komunikasi berbasis internet dan aplikasi juga bertujuan untuk meminimalisir pertemuan secara langsung dengan orang-orang Daerah/Pemda karena hal tersebut sangat rentan menimbulkan praktik transaksional.

Pentingnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandalkan kecepatan, ketepatan dan akurasi untuk menunjang paradigma pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam menuju ke arah digital. Kondisi existing sejatinya seluruh penyelenggara pemerintahan telah menggunakan aplikasi pertemuan digital seperti, *Zoom*, *Google Meet*, dan *Microsoft Teams*. Namun Kemendagri melalui Ditjen Otda ingin membawa pelayanan dengan pemanfaatan digital ke tahap yang lebih tinggi melalui KOVI OTDA sebagai layanan konsultasi Virtual Pertama yang menggunakan Platform *METAVERSE* dengan memastikan pelayanan yang terpadu dalam sebuah sistem yang terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Keberadaan KOVI OTDA merupakan salah satu dari bagian aplikasi pertemuan digital dengan berbasis kepada *metaverse*. Keberadaan KOVI OTDA merupakan komitmen Ditjen Otda Kemendagri sebagai bentuk penerapan *E-Government* dalam institusi pemerintahan. Keberadaan KOVI OTDA ke depan tidak hanya berurusan dengan persoalan efisiensi biaya dan kecanggihan teknologi namun juga berkaitan erat dengan keterwujudan nilai-nilai yang mencerminkan tata kelola

pemerintahan yang baik seperti transparansi, keterbukaan, ketepatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat. Secara sederhana, kita bisa mengartikan bahwa kesuksesan KOVI OTDA sebagai tindak lanjut implementasi *E-Government* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi terbaru, namun yang paling penting adalah tujuan besar dari penerapan teknologi tersebut yakni memberikan akses kemudahan pemberian konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan amanat Pembinaan dan Pengawasan yang melekat kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

1.2 LATAR BELAKANG

Seiring dengan berjalannya waktu kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mulai berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu indikasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ditandai dengan banyaknya pengetahuan dan teknologi baru yang bisa di manfaatkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Manusia dan teknologi, merupakan dua kata yang tidak akan pernah memiliki ujung pembahasan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna selalu melakukan inovasi di segala bidang hanya untuk memudahkan aktivitas yang ada dalam kehidupannya. Termasuk juga inovasi dalam melakukan pengelolaan komunikasi yang berjalan semakin kompleks. Pekerjaan di kantor adalah contoh konkret dari sebuah komunikasi yang kompleks itu. Melibatkan banyak orang, baik itu pegawai internal maupun rekan bisnis (Pemda) sebagai pihak eksternal. Dibutuhkan adanya sistem informasi yang bisa menghubungkan kedua pihak tersebut agar dapat terus berkomunikasi. Jalan yang mudah ditempuh ialah komunikasi menggunakan internet karena kecanggihan teknologi yang satu ini bisa menembus seluruh kalangan kelas sosial di masyarakat, waktu bahkan batasan geografis. Kita rasakan juga sekarang di masa pandemi ini, semua mulai berubah. Sistem informasi berbasis internet mendadak menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, bisa kita lihat yang tadinya jarang atau bahkan tidak pernah kita melakukan rapat virtual/*zoom meeting*, sekarang *zoom meeting* merupakan hal yang biasa dan bahkan lebih kita gemari.

Berdasarkan data PBB di tahun 2014, Indonesia dalam model pelayanan publik berbasis elektronik dengan presentasi penggunaan sebagaimana disebutkan di dalam Gambar 1 dan Gambar 2 bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura dalam penggunaan teknologi berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 2. Pelayanan public berbasis elektronik di Indonesia berdasarkan *stages* atau model tahapan *e-government* (United Nations, 2018)

Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
66,67%	73,91%	45,45%	63,04%

Tabel 1 Indikator Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Indonesia

Tabel 3. Pelayanan public berbasis elektronik di Singapura berdasarkan *stages* atau model tahapan *e-government* (United Nations, 2018)

Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
100%	91,30%	100%	96,74%

Tabel 2 Indikator Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Singapura

Lebih lanjut Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi 107 pada World E-Government Development Ranking yang dikeluarkan oleh lembaga PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) (United Nations, 2018).

Negara		World E-Government Development Ranking						Rata-Rata peringkat 2008-2018	Kenaikan atau Penurunan Peringkat (2008 – 2018)
		2008*	2010**	2012***	2014****	2016*****	2018*****		
1	Singapura	23	11	10	3	4	7	10 (3-23)	+16
2	Malaysia	34	32	40	52	60	48	44 (32-60)	-14
3	Brunei Darussalam	87	68	54	86	83	59	60 (54-87)	+28
4	Thailand	64	76	92	102	77	73	81 (64-102)	-9
5	Filipina	66	78	88	95	71	75	79 (66-95)	-9
6	Vietnam	91	90	83	99	89	88	90 (83-99)	+3
7	Indonesia	106	109	97	106	114	92	104 (92-114)	+14
8	Timor Leste	155	162	170	161	160	142	159 (142-170)	+13
9	Kamboja	139	140	155	139	158	145	146 (139-158)	-6
10	Myanmar	144	141	160	175	169	157	158 (144-175)	-13
11	Laos	156	151	153	152	148	162	154 (148-162)	-6

*-(United Nations, 2008), **-(United Nations, 2010), ***-(United Nations, 2012), ****-(United Nations, 2014), *****-(United Nations, 2016), *****-(United Nations, 2018)

Tabel 3 World E-Development Ranking

Selama dua dekade ini, Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat perlahan mulai bergeser dari nilai tradisional menuju modern. Hal ini perlu di respon dengan perubahan pada tubuh birokrasi institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Perlu adanya perubahan perspektif Administrasi, meninggalkan Perspektif Old Public Administration menuju Perspektif *New Public Service*. Janet dan Robert Denhardt (Denhardt & Denhardt, 2003) mengemukakan bahwa salah satu karakter dari prinsip *New Public Service* yakni Organisasi Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerja sama dalam proses kolaborasi (*processes of collaboration*) dan kepemimpinan bersama (*shared leadership*).

Berdasarkan Kerjasama antar instansi pemerintah masih sangat kurang. Sinergisme dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih sangat minim. Hal ini membuat pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkan publik publik terintegrasi satu pintu. Proses kolaboratif dan kepemimpinan bersama masih kerap diabaikan karena ego sektoral. Pada masa New Normal nanti, sinergitas dan koordinasi antar lembaga sangatlah dibutuhkan. Akses masyarakat ke kantor-kantor institusi pemerintah akan dibatasi dan mempersulit mereka dalam mengakses pelayanan publik. Apabila pelayanan secara konvensional tidak dialihkan kepada pelayanan berbasis elektronik secara terpadu, maka hal tersebut akan merugikan masyarakat. Para pemangku kepentingan harus merombak dan mengoptimalkan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik pada masa New Normal, tanpa harus mengunjungi kantor instansi pemerintah.

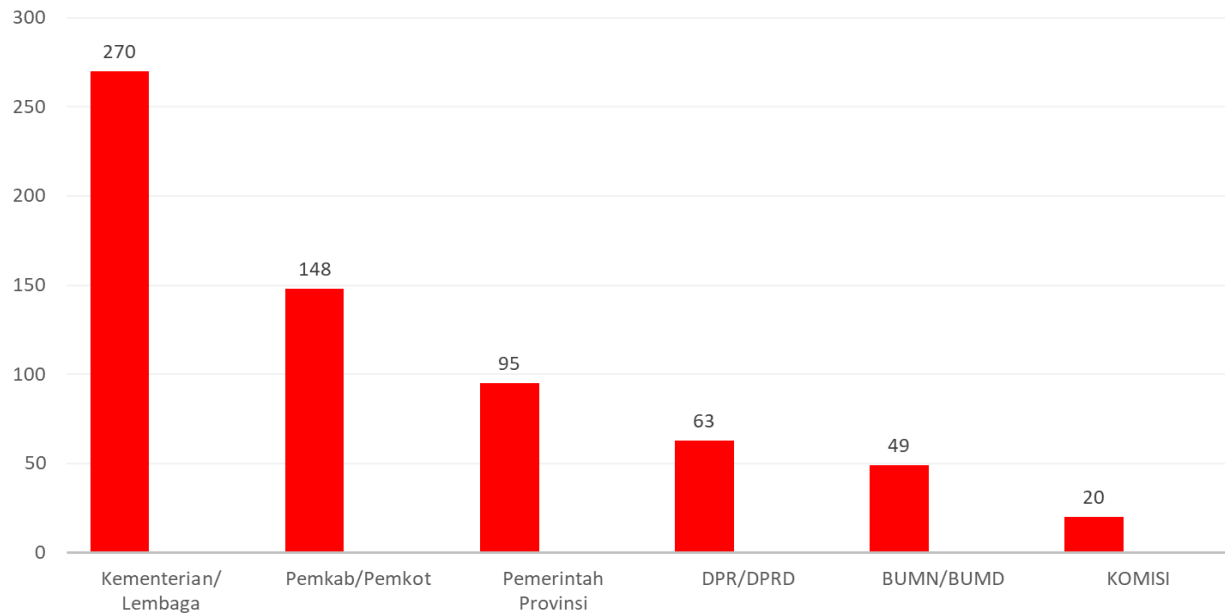
Inersia atau kelambanan organisasi harus dihindari dalam periode evolusi lingkungan atau teknologi saat ini. Kelambanan birokrasi, norma dan proses pemerintahan yang ketat, kekuatan hierarkis yang mengakar, dan ikatan menguntungkan yang ada di antara lembaga-lembaga, semuanya merupakan hambatan bagi inovasi dan adaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan yang berubah adalah suatu keharusan bagi organisasi. Model pemerintahan tradisional yang

didasarkan pada gagasan “konstruksi, pemeliharaan, dan aplikasi hanya dari pemerintah” telah membangun prosedur yang tidak fleksibel dan kompleks. Cloud, yang beroperasi berdasarkan gagasan “pemisahan kepemilikan dan operasi TI,” memerlukan reorganisasi struktur organisasi dan proses bisnis bagi agensi pemerintah untuk beradaptasi.

A. KONDISI SAAT INI

Berdasarkan kondisi diatas disertai memperhatikan arahan Bapak Mendagri pada Sabtu, 22 Januari 2022 secara virtual dalam arahannya Beliau menyampaikan, untuk meminimalisir pertemuan secara langsung dengan orang-orang Daerah/Pemda karena hal tersebut sangat rentan menimbulkan praktik transaksional, oleh karenanya kehadiran KOVI OTDA merupakan salah satu jalan alternatif sekaligus tindak lanjut arahan bapak Mendagri tersebut dalam memperpendek ruang pertemuan tatap muka, yakni menyempurnakan dan mengimplementasikan secara menyeluruh sebuah Program Layanan Konsultasi Virtual Ditjen OTDA. Kehadiran KOVI OTDA tidak lepas dari beberapa temuan yang menunjukkan masih banyaknya praktik transaksional dalam lingkup Kementerian/Lembaga khususnya yang bersinggungan dengan Pemerintah Daerah. Berikut potret beberapa temuan proses-proses transaksional di lingkup Kementerian/Lembaga dari berbagai sumber;

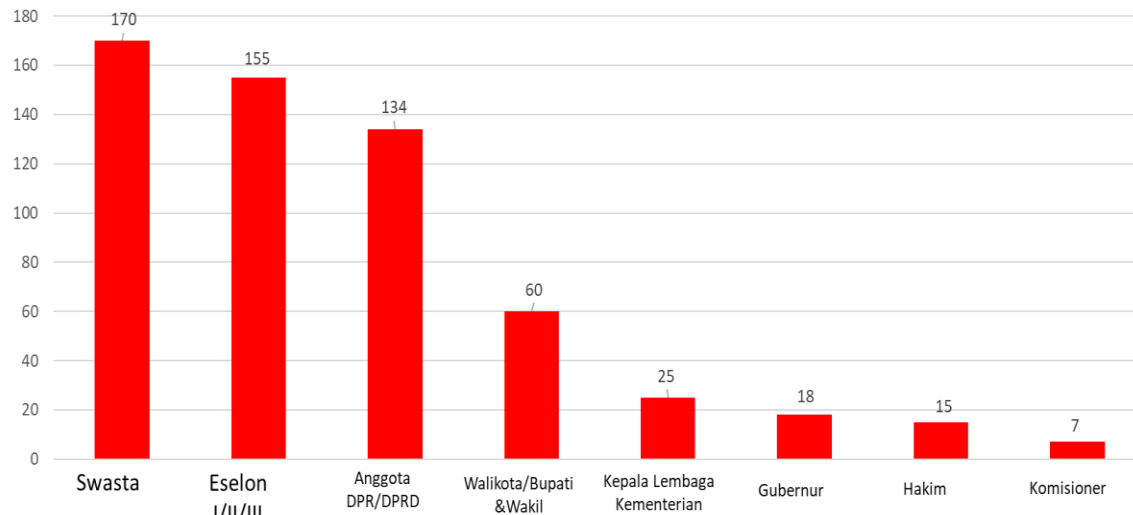
**Tingginya Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi
2004/2017***



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Gambar 1 Tingginya Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

**Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/ Jabatan
2004/2017***

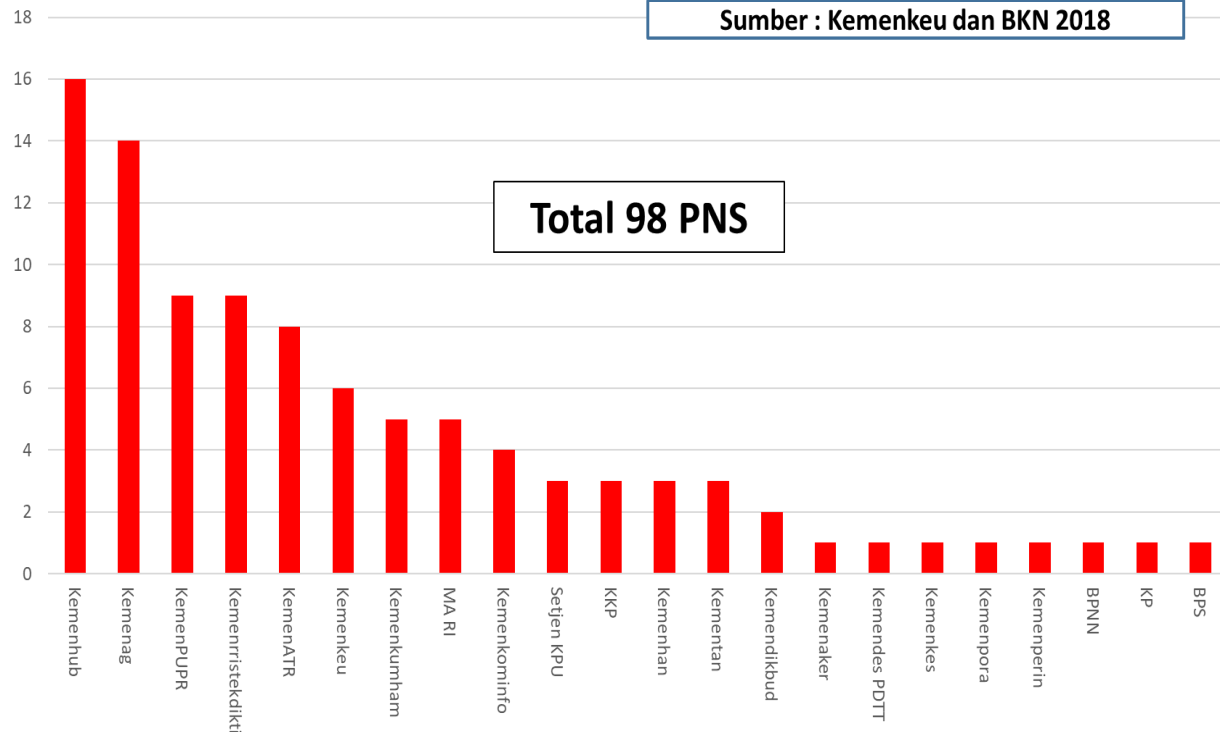


Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Gambar 2 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi Jabatan

REKAPITULASI PNS YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM LINGKUP KEMENTERIAN LEMBAGA SAMPAI DENGAN 12 SEPTEMBER 2018

Sumber : Kemenkeu dan BKN 2018

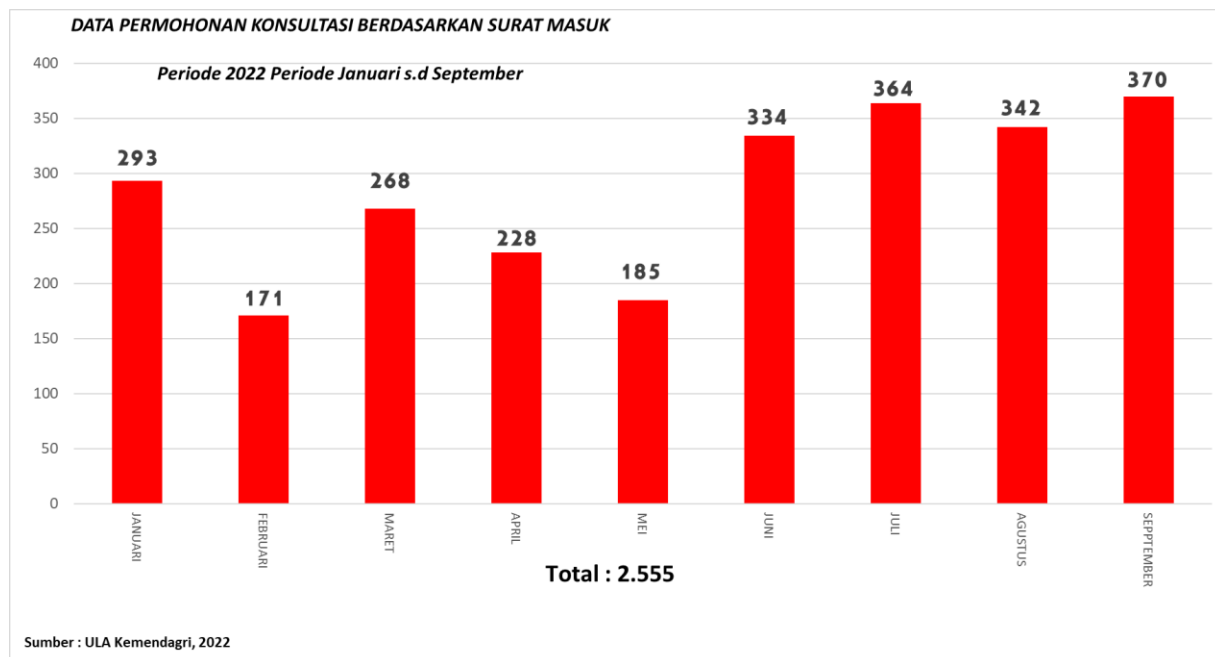


Gambar 3 Rekapitulasi PNS Yang Terlibat Korupsi dalam Lingkup Kementerian/Lembaga

Hal lain yang turut melatarbelakangi perlunya optimalisasi penguatan KOVI OTDA adalah kompleksitas kebijakan Ditjen Otda dan tingginya permintaan pelayanan konsultasi kebijakan mengenai otonomi daerah. Dengan agenda reformasi birokrasi yang mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan publik. Melalui implementasi E-Government, Pemerintah Daerah tetap dapat mengakses informasi dan layanan publik. Dengan adanya fasilitas tersebut, interaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan akan menjadi lebih produktif dan efisien karena tidak mengharuskan untuk melakukan pertemuan secara tatap muka dan membebani kas anggaran negara untuk melakukan koordinasi. Terkait dengan kompleksitas kebijakan yang melekat pada Ditjen Otda di antaranya permohonan aspirasi pemekaran dan kelayakan pemekaran, permohonan konsultasi dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/Istimewa, penyelesaian sengketa dalam urusan pemerintahan yang melibatkan pemerintah dengan swasta, permohonan fasilitasi dan konsultasi penyusunan Peraturan Daerah, konsultasi penyelesaian persoalan kepala daerah dan DPRD, dan lain sebagainya yang ke semuanya merupakan ruh dan inti

penyelenggaraan dan mandat Otonomi Daerah. Dapat penulis sampaikan bahwa dengan tingginya sensitivitas kebijakan yang melekat pada Ditjen Otda transparansi pelayanan, konsultasi ataupun permohonan fasilitasi urusan pemerintahan daerah perlu dilakukan terobosan nyata dengan membuat sebuah penguatan dalam penyelenggaraan berbasis pada digitalisasi secara tersistematis.

Selain itu ada hal urgensial lain yang mengharuskan penguatan terhadap optimalisasi keberadaan KOVI OTDA yakni tingginya jumlah permintaan pelayanan konsultasi kepada Ditjen Otda yang berkaitan dengan kebijakan Otonomi Daerah. Berikut data yang terhimpun permohonan konsultasi berdasarkan surat sejak Januari s.d September 2022:



Gambar 4 Permohonan Konsultasi Ditjen Otda Berdasarkan Surat Masuk

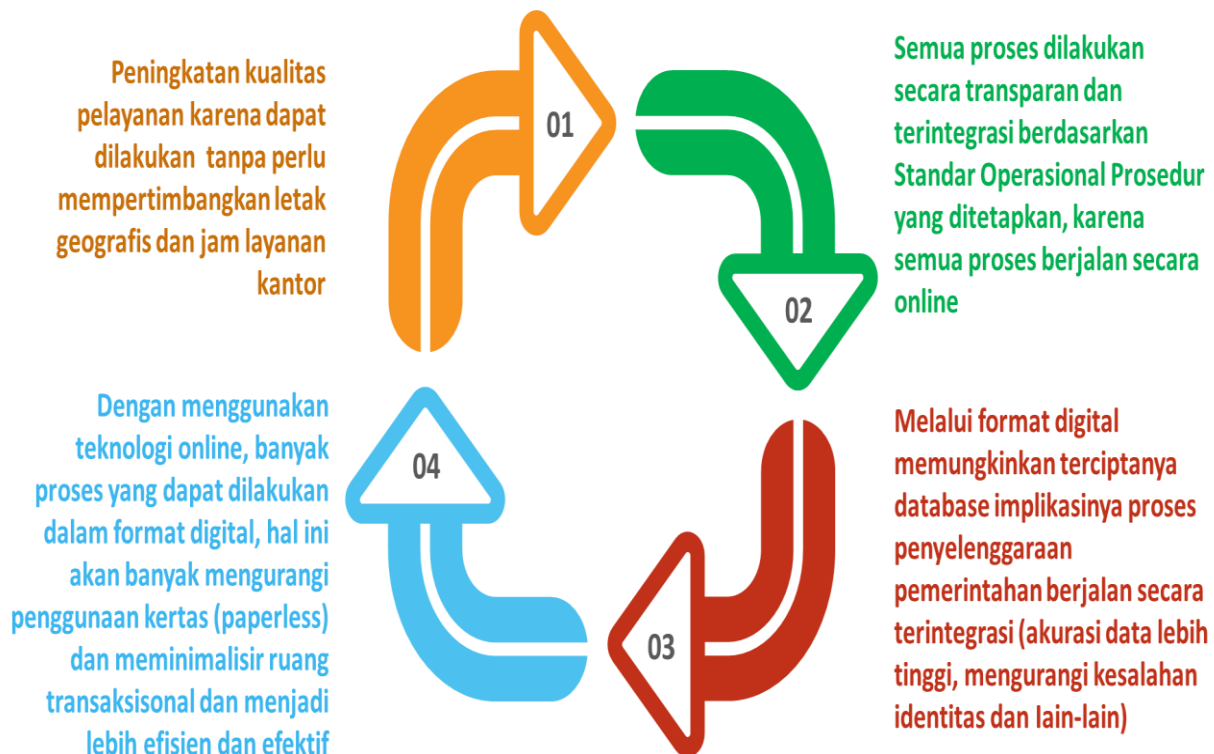
Berdasarkan data di atas sejatinya dapat penulis sampaikan bahwa permohonan konsultasi kepada ditjen Otda sebagaimana grafik di atas tidak mencerminkan secara keseluruhan jumlah permohonan konsultasi yang masuk pada Ditjen Otda. Praktikanya di lapangan, banyak konsultasi yang dilakukan pihak aparaturnya Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak melalui usulan surat resmi yang masuk. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya salah satunya sistem birokrasi yang Panjang. Implikasi jangka panjangnya adalah kesulitan dalam melakukan proses *tracking* terhadap persoalan yang mungkin timbul di masa

yang akan datang atau dalam spektrum yang lebih tinggi potensi proses penyelewengan atau ketidaksesuaian prosedur sulit dilacak jika tidak melalui sebuah sistem yang terintegrasi.

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Kehadiran KOVI OTDA diharapkan mampu menjadi suatu sistem yang terintegrasi dalam melakukan *tracking* proses konsultasi serta jaminan transparansi dalam pelayanan konsultasi. Sehingga penulis dapat mengambil benang merah bahwa keberadaan KOVI OTDA sebagai alternatif dalam mengatasi tingginya jumlah permintaan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Penerapan *E-Government* melalui kehadiran KOVI OTDA sama sekali tidak sama dengan menjadikan kantor-kantor pemerintahan sebagai lingkungan *high-tech* (teknologi tinggi), melainkan kehadiran *E-Government* bertujuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat pada orang-orang yang menggunakan layanan-layanan tersebut

Dengan adanya *online* sistem yang dikelola secara terpadu, tergambar dalam bagan di bawah ini:



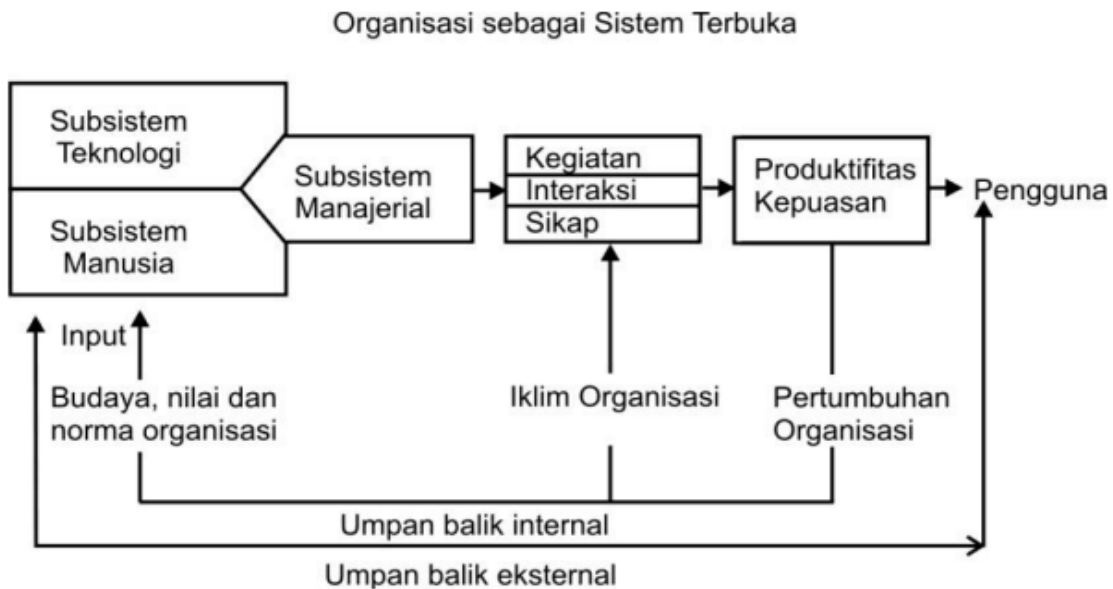
Bagan 1 hubungan keterkaitan pelayanan terpadu berbasis online

Optimalisasi penggunaan KOVI OTDA menjadi kebutuhan mendesak dikarenakan beberapa faktor diantaranya; *pertama* Kondisi existing KOVI OTDA baru menjangkau ditingkat Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga optimalisasi dalam proyek perubahan ini bertujuan pada jangka panjang pengembangan pelayanan KOVI OTDA dapat dirasakan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah diseluruh level (Provinsi dan Kabupaten Kota). *Kedua*, Fakta lain penggunaan pelayanan KOVI OTDA hanya pada Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, padahal terdapat 4 (empat) Direktorat lain dibawah Ditjen Otda yang juga dalam kesehariannya memiliki interaksi dengan intensitas yang tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan. *Ketiga* Membuat Pedoman Pelayanan Publik Kepada Pemerintah Daerah mengenai penggunaan Aplikasi KOVI OTDA, *Keempat* dari hasil monitoring implementasi KOVI OTDA sejak April 2022 dirasa belum optimal, kondisi existing belum ada rekam jejak menggunakan KOVI OTDA dan pelayanan KOVI OTDA belum melalui tahapan kesepakatan atau surat pemberitahuan resmi yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan konsultasi secara virtual. Hal lain yang juga berpengaruh adalah fasilitas sarana dan prasarana pendukung KOVI OTDA di beberapa daerah belum tersedia, bilamanapun sudah terdapat sarana dan fasilitasnya pengetahuan dan kemauan aparatur penyelenggara pemerintah daerah belum siap menggunakan layanan metaverse.

C. Diagnosa Organisasi

Untuk mewujudkan perubahan mekanisme kolaborasi ASN antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah diperlukan identifikasi kapasitas organisasi sebelum melakukan proyek perubahan secara sistematis. Guna menjawab permasalahan isu strategis sebagaimana di atas, diperlukan diagnosis organisasi untuk mengetahui kemampuan apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum melakukan aksi perubahan, *Project Leader* perlu mengetahui keadaan organisasinya dengan melakukan diagnosa organisasi. Penerapan yang dilakukan pada diagnosa terhadap organisasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam menjalankan KOVI OTDA sebagai suatu sistem, maka dapat kita lihat dari sudut pandang fungsional yaitu dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang dilakukan organisasi tersebut. Kita juga dapat membedakan sub-sistemnya menurut tingkatan manajerial dan lain sebagainya. Namun demikian

untuk keperluan pembahasan kita, kiranya akan lebih bermanfaat bila kita mengikuti cara pengelompokan yang dilakukan oleh Beer dan Huse (1980), sebagai berikut:



Bagan 2 Organisasi Sebagai Sistem Terbuka

Konsep *Organization as an Open System* (organisasi sebagai sistem yang terbuka) merujuk kepada perlunya kesinambungan dan kolaborasi antar level pemerintahan secara terbuka. Kehadiran KOVI OTDA adalah bagian dari kesuksesan reformasi organisasi pemerintahan dengan cara yang cerdas dapat implementatif dilapangan. Perubahan ini tidak hanya membahas aktivitas baru yang harus dilakukan organisasi, tetapi juga mencakup tugas-tugas unit-unit organisasi yang harus dilakukan. Konfigurasi organisasi saat ini dalam administrasi publik umumnya terdesentralisasi dan berorientasi fungsional tetapi terpisah. Pemusatan sementara beberapa tugas dan kompetensi sangat penting untuk diterapkan guna menggabungkan sumber daya, memprioritaskan upaya, dan menawarkan dorongan untuk perubahan (misalnya, dalam program digitalisasi pemerintahan). Ada tiga tugas organisasi utama yang harus didiskusikan, didistribusikan, dan ditetapkan dalam administrasi publik jika pemerintahan yang cerdas ingin berhasil diimplementasikan: (1) arah strategis (*strategic steering*) sumber daya, proyek, dan tindakan; (2) koordinasi, berbagi pengetahuan, dan standarisasi; (3) pengembangan dan realisasi layanan baru dan berbagi solusi, dan standarisasi.

Penulis membatasi organisasi ini di lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam rangka pemanfaatan KOVI OTDA, penerapan konsep *Organization as an Open System* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Masukan (Input) usaha memasukkan energi dari lingkungan terjadi melalui interaksi dengan berbagai macam subsistem:

- Sub-sistem Teknologi, sub-sistem ini mencakup aspek-aspek teknologi, mesin-mesin, proses dan metode yang digunakan dalam memproses suatu masukan menjadi suatu hasil produksi berupa barang atau jasa. Bahwa kedepan pemanfaatan teknologi dalam menunjang urusan konsultasi dan pembinaan terhadap daerah dapat pula memanfaatkan teknologi salah satunya adalah membudidayakan KOVI OTDA dalam agenda pekerjaan sehari-hari.
- Sub-sistem Manajerial, jenjang organisasi, termasuk susunan atau kerangka peranan dan tanggung jawab, merupakan unsur penting dari suatu sub-sistem manajerial. Sub-sistem ini sangat dipengaruhi oleh teknologi organisasi, termasuk praktik-praktik nyata yang terjadi dalam organisasi itu sehari-hari. Kebijakan yang digariskan serta ketentuan-ketentuan formal yang dipergunakan dan sikap pengambilan keputusan penulis sebagai salah satu pimpinan merupakan bagian dari konsep penerapan KOVI OTDA. Kondisi *existing* KOVI OTDA sudah masuk dalam proses pengembangan yang lebih luas yakni, dalam tahap Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dan telah dilakukan tahap penjajakan awal perumusan kesepakatan penggunaannya dengan Pemerintah Daerah.
- Sub-sistem Manusia. Pada dasarnya sub-sistem manusia akan menentukan sub-sistem teknologi dan manajerial yang dipergunakan. Di dalam sub-sistem manusia ini terdapat manusia-manusia yang memasuki suatu organisasi dengan berbagai macam keahlian teknis dan manajerial, pengetahuan dan cita-cita tertentu. dalam internal Ditjen Otda kondisi *existing* keahlian dan keterampilan para ASN nya dalam pemanfaatan Teknologi sudah dalam kategori baik.

- Sub-sistem Budaya, sebagai hasil dari interaksi dari ketiga sub-sistem tadi, maka organisasi akan mengembangkan sub-sistem budaya tertentu yaitu suatu budaya yang mungkin hanya berlaku dalam organisasi tersebut. Sub-sistem ini akan menentukan cara bertindak manusia-manusia yang ada di dalamnya dan juga bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. ASN dalam lingkup DITjen OTDA kondisi existing mengarah pada organisasi fungsi, maksudnya bahwa setiap ASN dari berbagai bidang tugas yang melekat harus memiliki keahlian khusus yang dapat menunjang kinerja organisasi dampaknya patologi birokrasi yang salah satunya adalah budaya kerja yang cenderung lambat dan berbelit-belit dan koordinasi yang cukup mudah untuk disampaikan dan sangat sulit di implementasikan akan terus terjadi. Oleh karenanya penerapan KOVI OTDA juga membutuhkan keterbiasaaan dan komitmen bersama.
- 2) Iklim Organisasi; kegiatan sehari-hari, interaksi dan sikap tadi tercermin nyata dalam suasana kerja. Hal-hal tersebut dalam bentuk rasa percaya mempercayai, kompetisi atau kolaborasi, dukungan atau keinginan saling jegal, komunikasi yang terbuka atau tertutup dan sebagainya. Iklim organisasi ini sesungguhnya dipengaruhi oleh budaya, nilai dan norma yang hidup dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi berkembang dan berubah secara perlahan, karena ia merupakan hasil interaksi.
 - 3) Pertumbuhan dan pembelajar; suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dengan baik bila selain organisasi itu mempunyai produktivitas yang tinggi, ia juga dapat memberikan kepuasan kepada para penggunanya. Pertumbuhannya bukan pertumbuhan dalam arti bila salah satu unsur tersebut dalam mencapai tujuannya mengorbankan unsur yang lainnya. Organisasi yang produktif tidak akan mengorbankan unsur lainnya dalam mencapai tujuan, tetapi memberikan kepuasan kepada para penggunanya. Pertumbuhan organisasi, seperti juga halnya pertumbuhan perorangan, merupakan fungsi dari produktivitas dan kepuasan.

Maka dari analisis *Organization as an Open System* untuk mengetahui

lingkungan kerja organisasi didapat beberapa hal kunci untuk menyelesaikan isu strategis perlunya Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse yaitu betapa pentingnya pembangunan terhadap sub-sistem yang berkolerasi pada input yang dihasilkan, iklim organisasi, dan pertumbuhan dan pembelajaran yang berorientasi pada output produktivitas, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan kolaborasi antar level pemerintahan melalui kehadiran KOVI OTDA berbasis metaverse.

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari proyek perubahan ini “*Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse*”, dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai penulis merumuskan capaian jangka pendek, capaian jangka menengah, dan capaian jangka panjang dari proyek perubahan ini sebagai berikut;

1. Jangka Pendek:
 - a. Pengadaan alat Oculus;
 - b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan dan Implementasi KOVI OTDA;
 - c. Penyusunan Surat Pemberitahuan penggunaan Aplikasi KOVI OTDA;
 - d. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA.
2. Jangka Menengah:
 - a. Penetapan Pemkot Makassar Sebagai Daerah Percontohan Penggunaan Konsultasi Berbasis *Metaverse*.
 - b. Penyiapan ruangan khusus penggunaan KOVI OTDA
3. Jangka Panjang:

Pengembangan Aplikasi KOVI OTDA dengan menambahkan fitur Sub Sistem terintegrasi dari beberapa layanan digital yang berada di dalam lingkup Ditjen Otda.

1.4 MANFAAT

Manfaat penguatan dan pengembangan penggunaan KOVI OTDA dilingkup Ditjen Otda dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi;

a. Bagi organisasi:

Adanya pencapaian dan peningkatan kinerja dan penguatan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

b. Bagi pemangku kepentingan:

Adanya kemudahan dalam melaksanakan proses konsultasi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dengan mendekatkan rentang kendali.

1.5 OUTPUT DAN OUTCOME

Output dari inovasi ini berupa produk akhir yaitu:

- a. Penyediaan alat pendukung pelayanan KOVI OTDA (OCULUS);
- b. Penetapan Kerangka Acuan Kerja Pengembangan dan Implementasi KOVI OTDA;
- c. Dukungan Komitmen Pejabat Lingkup Ditjen Otda dalam penggunaan KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif layanan konsultasi dengan Pemerintah Daerah
- d. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA
- e. Penetapan Pemerintah Daerah percontohan sebagai langkah awal perluasan Implementasi penggunaan Aplikasi KOVI OTDA secara terintegrasi pada setiap layanan konsultasi urusan Pemerintah Daerah pada setiap level (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Outcome dari inovasi ini yaitu:

- a. pelayanan konsultasi urusan Pemerintah Daerah yang akuntabel, terintegrasi, akurat, efisien, dan efektif sebagai bentuk komitmen reformasi birokrasi dalam mendekatkan rentang kendali koordinasi

- b. Upaya meminimalisir praktik dan ruang transaksional dan dapat memonitor dan merekam secara baik jenis layanan konsultasi yang dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.6 TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyusun Proyek Perubahan dengan judul **“Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse”**. Pemilihan isu proyek perubahan menitikberatkan pada kebutuhan perlunya penguatan konsep kolaborasi antar level pemerintahan salah satunya dalam penguatan komunikasi tanpa harus mempertimbangkan letak geografis. Sebagai permulaan *project leader* menggunakan teknik Analisa USG dengan rincian sebagai berikut; (*urgency*) Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntuk memecahkan masalah, (*seriousness*) seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan, dan (*growth*) seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan. Berdasarkan analisa isu strategis menggunakan metode USG pada tabel dibawah ini:

TABEL 4
TABEL ISU DAN PENETAPAN ISU METODE USG

No	ISU AKTUAL/ MASALAH POKOK	KRITERIA			SKOR	PRIORITAS
		U	S	G		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belum meratanya pengetahuan dan kompetensi ASN dalam memanfaatkan teknologi konsultasi berbasis metaverse.	2	2	1	5	III

2	Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung konsultasi virtual berbasis metaverse.	3	3	3	9	II
3	Belum terdapatnya komitmen dan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dalam penggunaan layanan konsultasi secara virtual berbasis <i>metaverse</i> dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan.	5	4	5	14	I

Keterangan :

Angka 1 : tidak gawat/mendesak

Angka 2 : kurang gawat/mendesak

Angka 3 : cukup gawat/mendesak

Angka 4 : gawat/mendesak

Angka 5 : sangat gawat/mendesak

Berdasarkan Analisa USG diatas penulis berkesimpulan bahwa diperlukan Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA berbasis metaverse dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pasca penulis menetapkan isu berdasarkan pemetaan USG, selanjutnya penulis memetakan pemetaan terhadap isu terpilih menggunakan SWOT untuk melihat kekuatan, kesempatan/peluang, kelemahan, dan ancaman yang berpotensi dapat terjadi dimasa depan bilamana terjadi optimalisasi pelayanan konsultasi metarverse menggunakan KOVI OTDA. dapat dirumuskan dalam peta kerangka SWOT sebagai berikut:

TABEL 5
ANALISIS SWOT

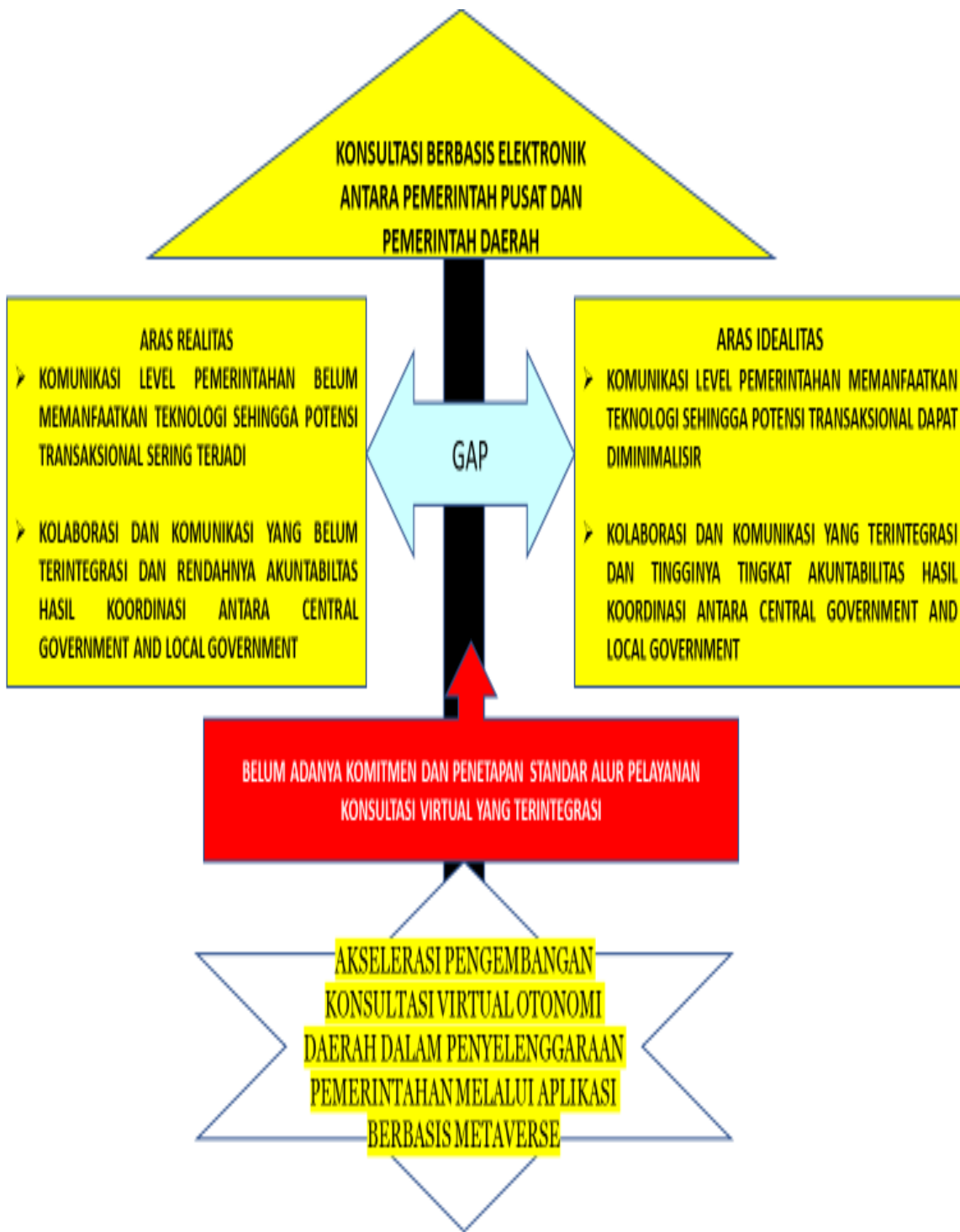
<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
1. Komitmen bersama untuk menghasilkan Pelayanan Konsultasi kepada Pemerintah Daerah yang akuntabel dan respoonsif.	1. Permintaan konsultasi yang tinggi menyebabkan kelebihan beban kerja kepada aparatur yang disertai dengan minimnya jumlah aparatur pada beberapa komponen.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki dasar-dasar pengetahuan pelayanan	2. Aplikasi KOVI OTDA masih dalam tahap pengembangan dan perlu mendapatkan beberapa sentuhan penyempurnaan dan

<p>konsultasi dengan kemampuan teknologi yang mumpuni pada lingkup Ditjen Otda.</p> <p>3. Adanya pembentukan tim khusus yang akan mengelola aplikasi KOVI OTDA dalam menanggulangi persoalan dan monitoring pelaksanaan kegiatan konsultasi virtual berbasis metaverse.</p>	<p>kelengkapn fitur untuk menciptkan system pelayanan konsultasi yang terintegrasi.</p> <p>3. Membutuhkan spesifikasi dan keterampilan khusus dalam mengelola KOVI OTDA yang mengharuskan perlunya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur di level Pusat sampai ketinggian Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
<p><i>Opportunities</i></p>	<p><i>Threats</i></p>
<p>1. Terdapat regulasi yang mengatur sistematika mekanisme pemberian pelayanan konsultasi virtual melalui penetapan Standar Operasional Prosedur.</p> <p>2. KOVI OTDA merupakan aplikasi konsultasi virtual pertama di lingkup Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan teknologi metaverse dengan tujuan untuk membuat layanan konsultasi jarak jauh terasa nyata dan dekat</p>	<p>1. Penggunaan perangkat penunjang KOVI OTDA membutuhkan anggaran yang cukup besar dan cukup membebankan pemerintah Daerah di tengah pemulihan pasca pandemi Covid-19.</p> <p>2. Kesulitan untuk menumbuhkan mentalitas efisiensi di tataran Pemerintah Daerah karena melalui penggunaan konsultasi virtual ini berdampak pada menurunnya belanja perjalanan dinas Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat</p>

Berdasarkan Analisa SWOT di atas, maka strategi yang dipilih dalam dalam menghadapi persoalan dimaksud meliputi;

- a. Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang melalui diberlakukannya sistem konsultasi virtual pada setiap Direktorat di bawah lingkup Ditjen Otda, perlu dilakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan komunikasi antara Ditjen Otda dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota guna mendukung mandat dan visi organisasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, transparansi dan efektivitas tanpa mengenal sekat jarak geografis yang luas;
- b. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan menumbuhkan komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap memberikan payung hukum Standar Operasional Prosedur penggunaan konsultasi virtual demi menguatnya kolaborasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Otda Kemendagri dengan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan strategi tersebut maka gagasan/terobosan yang diusulkan adalah Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse. Gagasan penulis di atas dapat tergambar pada alur pikir seperti di bawah ini;



Bagan 3 Alur pikir Urgensi proyek perubahan

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1 FOKUS PROYEK PERUBAHAN

Fokus proyek perubahan ini meliputi;

1. Pembentukan dan pembuatan Surat Keputusan Tim Efektif
2. Pemilihan Pemerintah Daerah sebagai salah satu studi kasus daerah percontohan awal dalam penggunaan Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah (KOVI OTDA)
3. Pembuatan Komitmen penggunaan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA) dalam pelayanan konsultasi di lingkup Ditjen Otonomi Daerah.
4. Inovasi berupa penetapan Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah (KOVI OTDA) dalam melayani Konsultasi Pemerintah Daerah bentuk Standar Operasional Prosedur;
5. Inovasi Perluasan Aplikasi Konsultasi Virtual Ditjen Ditjen (KOVI OTDA) berbasis Metaverse berdasarkan Perjanjian Komitmen di Lingkup Direktorat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
6. Penyediaan alat “*oculus*” kepada setiap Direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam menunjang kesuksesan penyelenggaraan konsultasi berbasis metaverse.

2.2 MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

Milestones adalah tahapan dan capaian/produk antara yang harus dilakukan untuk suatu tujuan akhir yang pelaksanaannya pada jangka pendek, menengah, dan panjang yang merupakan rencana tahapan yang akan dilaksanakan selama proses implementasi proyek perubahan. Rencana tahapan tersebut terbagi dalam *time-frame* yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan output yang akan dicapai sesuai tujuan proyek perubahan. Adapun *time-frame* dari Proyek Perubahan berupa Akselerasi Transformasi Digital Dalam Rangka Konsultasi Virtual Penyelenggaraan Otonomi

Daerah Melalui Aplikasi Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah (KOVI OTDA) Berbasis Metaverse antara lain;

Penyusunan inovasi ini terbagi dalam beberapa tahap yakni sebagai berikut:

No	Tahapan/Kegiatan	Waktu	Output/fisik	Hasil	
Jangka Pendek					
1.	Mengkomunikasikan rencana proyek kepada Bapak Dirjen Otda selaku mentor	Melaporkan rencana proyek perubahan kepada Bapak Dirjen Otda	M3 s.d. M4 September 2022	Undangan rapat, Paparan, Dokumentasi, Berita Acara persetujuan Bapak Dirjen Otda	Tercapainya persetujuan dari Bapak Dirjen Otda terhadap pelaksanaan proyek
2.	Pembentukan Tim Efektif	Rapat dengan Kepala Bagian Umum dan Direktur lingkup Ditjen Otda	M1 s.d M2 September 2022	Undangan Rapat Konsolidasi, SK Tim Efektif	Terbentuknya Tim Efektif optimalisasi KOVI OTDA
3.	Rapat penyusunan Kerangka Acuan Kerja pengembangan dan penguatan penggunaan aplikasi KOVI OTDA	Rapat Tim Efektif dan Lembaga terkait dalam penyusunan kerangka acuan pengembangan aplikasi KOVI OTDA	M4 September s.d. M1 Oktober 2022	Dokumentasi foto, dan TOR penyusunan pengembangan dan penguatan penggunaan aplikasi KOVI OTDA	Tersusunnya kerangka acuan kerja pengembangan dan penguatan penggunaan aplikasi KOVI OTDA

4.	Penerbitan surat pemberitahuan kepada PEMDA terkait penggunaan KOVI OTDA	Rapat konsolidasi di tingkat internal	M2 s.d. M3 Oktober 2022	Surat Pemberitahuan	Terbitnya surat pemberitahuan Ditjen Otda kepada Pemerintah Daerah
5.	Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA	Rapat Konsolidasi Tim Efektif dan Komponen Direktorat di lingkup Ditjen OTDA	M2 s.d M3 Oktober 2022	Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA	Terdapatnya Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dalam pelayanan kepada Pemerintah Daerah
6.	Pengadaan alat pendukung pelayanan KOVI OTDA	Rapat Konsolidasi dengan Kabag Umum dan Kabag Perencanaan bersama Tim Efektif	M3 s.d M4 Oktober 2022	Terdapatnya alat pendukung pelayanan KOVI OTDA yakni OCULUS	Pelayanan KOVI OTDA dapat diimplementasikan
7.	Dukungan dan Komitmen Tertulis Dirjen Otda dan seluruh Direktur dalam lingkup Ditjen Otda	Konsolidasi dengan para pejabat di lingkup Ditjen Otda	M3 Oktober s.d M2 November 2022	Penyerahan alat oculus dan pernyataan dukungan	Memastikan keberlanjutan program KOVI OTDA dalam terlaksana

8.	Uji coba layanan kepada KOVI OTDA	Kegiatan Uji coba pada lingkup Komponen di Internal Ditjen Otda.	M4 Oktober s.d M2 November 2022	Dokumen laporan monitoring dan kesiapan penggunaan KOVI OTDA	Simulasi terhadap penggunaan pelayanan virtual melalui KOVI OTDA
-----------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--

JANGKA MENENGAH

1.	Penetapan Pemkot Makassar Sebagai Daerah Percontohan Penggunaan Konsultasi Berbasis <i>Metaverse</i>	Melakukan peninjakan terhadap Pemkot Makassar sebagai daerah percontohan bagi Pemda lain.	M1 November 2022 s.d M4 April 2023	Dokumentasi layanan konsultasi dan laporan hasil ujicoba	Pelayanan konsultasi yang cepat dan efektif dengan dapat melakukan penghematan pada khas anggaran belanja.
2.	Penyiapan ruangan khusus penggunaan KOVI OTDA	Menyiapkan ruang khusus fasilitasi layanan konsultasi secara virtual melalui KOVI OTDA berbasis metaverse untuk pelaksanaan Konsultasi dalam lingkup Ditjen Otda Kemendagri.	M1 November s.d M.4 Desember 2022	Ruangan Khusus Konsultasi Virtual KOVI OTDA.	Pelayanan konsultasi yang cepat dan efektif dengan dapat melakukan penghematan pada khas anggaran belanja.

JANGKA PANJANG

1.	Pembahasan dan Pengembangan Aplikasi KOVI OTDA dengan menambahkan fitur Sub Sistem terintegrasi dari beberapa layanan digital yang berada di dalam lingkup Ditjen Otda.	Rapat dengan seluruh komponen direktorat di lingkup Ditjen Otda	M1 Mei 2023 s.d. M4 Mei 2024	Undangan rapat, dokumentasi rapat, Berita Acara Rapat	Terlaksananya pembahasan dan penguatan konsultasi berbasis <i>metaverse</i> dengan Pemerintah Daerah.
2.	Pembahasan Penyusunan system terintegrasi dengan layanan digital dilingkup Kementerian Dalam Negeri	Rapat antara Ditjen Otda dengan Seluruh Ditjen dilingkup Kemendagri	M1 Mei 2023 s.d. M4 Mei 2024	Laporan dan <i>grand design</i> penyusunan sistem pelayanan konsultasi terintegrasi	Terintegrasinya pelayanan publik yang akuntabel dan responsif

2.3 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Kendala yang dihadapi pada implementasi inovasi ini dan perumusan solusipenyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Potensi Kendala	Solusi
Waktu pengerjaan lebih lama dibandingkan <i>timeline</i> yang sudah direncanakan.	Pemantauan secara berkala pada setiap tahapan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara kolektif kolegial dengan pembentukan tim efektif yang dikoordinasikan langsung <i>project leader</i> .

<p>Keterbatasan anggaran dalam penyediaan infrastruktur pendukung pelayanan KOVI OTDA, selain itu diperlukan pula konektivitas yang tinggi di daerah. Kondisi existing masih terdapat beberapa daerah yang belum memiliki konektivitas tinggi di wilayah timur contohnya.</p>	<p>Merumuskan plot rencana anggaran dalam rencana kerja tahun anggaran 2023 sebagai upaya pengadaan sarana pendukung dan penguatan dalam implementasi KOVI OTDA.</p>
<p>Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dalam penyelenggaraan konsultasi virtual belum populer digunakan di kalangan pemerintah.</p>	<p>Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA butuh eksplorasi dan pendalaman terhadap mekanisme penyusunannya dengan melibatkan berbagai stakeholders terkait (Kementerian/Lembaga Teknis dan masukan pemerintah Daerah) untuk merumuskan Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA yang memudahkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Konsistensi implementasi pelayanan konsultasi virtual berbasis metaverse ditingkatkan Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota).</p>	<p>Pelayanan konsultasi berbasis digital membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses perubahan konsultasi yang sifatnya konvensional ke arah metaverse berbasis pada digital seperti menumbuhkan budaya kerja dan pembangunan ulang perspektif efisiensi secara berjenjang dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat</p>

<p>Kehadiran Tim efektif bersumber dari aparatur di lingkup Ditjen Otda, sementara disisi lain personil Tim Efektif merupakan bagian dari aparatur di beberapa komponen yang memiliki beban kerja dan tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan jabatan yang melekat padanya. Dalam beberapa kesempatan dapat dipastikan bahwa Tim Efektif tidak dapat bekerja totalitas pada tim ini karena terdapat tugas yang melekat pada dirinya sebagai aparatur di bawah lingkup Ditjen Otda.</p>	<p>Penyusunan SK Tim dengan Jadwal Rapat terstruktur agar memudahkan dalam manajemen waktu serta pegawai yang telah disetujui oleh masing-masing atasan langsung dari personil Tim Efektif guna percepatan dalam proses penyempurnaan aplikasi KOVI OTDA</p>
---	--

2.4 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sebagai berikut:

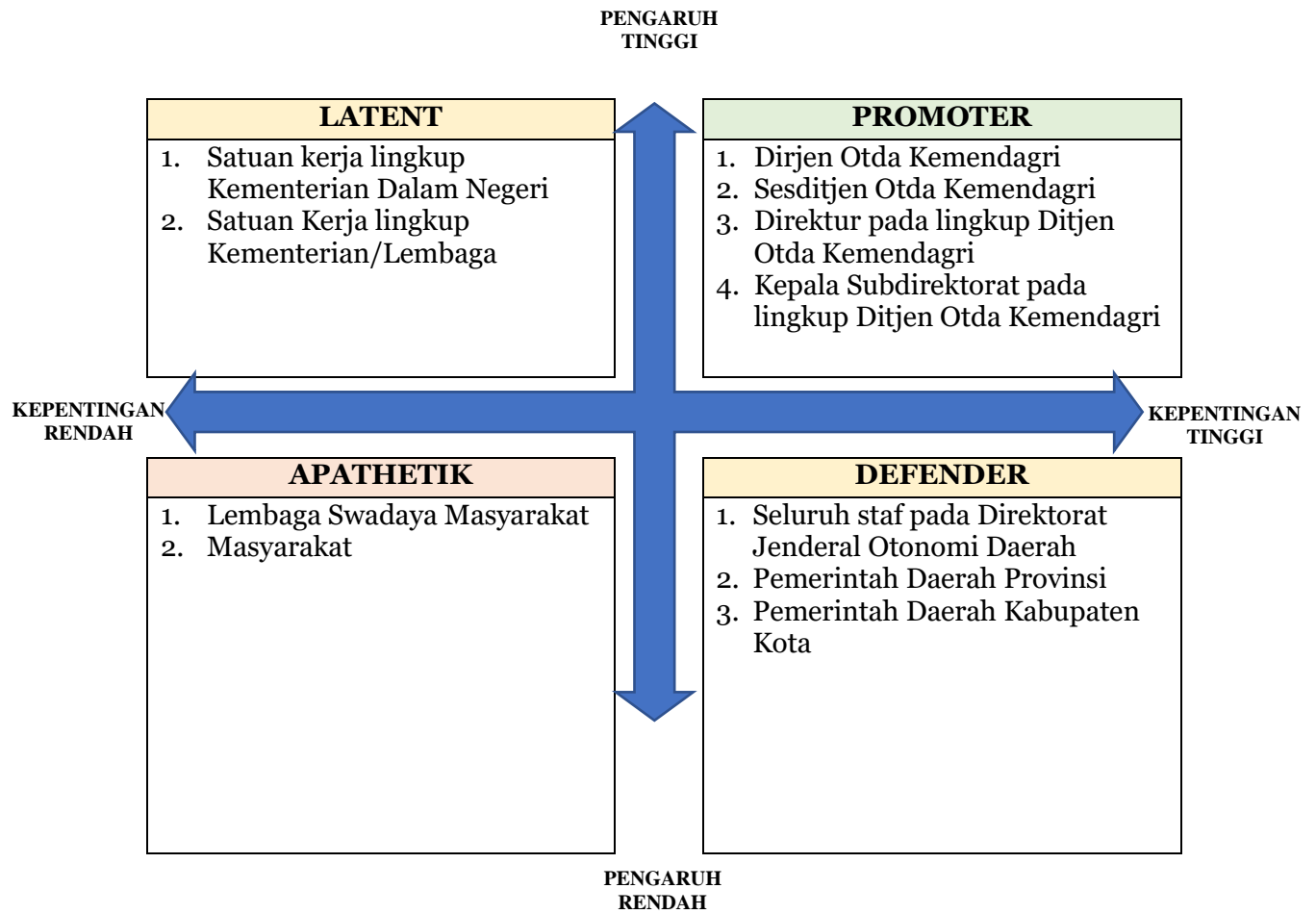
1. Dukungan dan komitmen penuh dari para *stakeholders* dalam implementasi KOVI OTDA
2. Terbangunnya Komunikasi Yang efektif dan Efisien antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Efisiensi dan efektivitas kinerja tim teknis dalam Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dan sosialisasi terhadap pelayanan KOVI OTDA kepada Pemerintah Daerah
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala implementasi KOVI OTDA dengan memperhatikan masukan perbaikan dari seluruh komponen

5. Penguatan terhadap sarana pendukung dalam penyelenggaraan KOVI OTDA dari sisi infrastruktur dan kecapan serta kesadaran sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan di setiap level pemerintahan.

2.5 IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini menerapkan dua pendekatan yaitu strategi marketing selama proses penyusunan proyek perubahan dan strategi marketing hasil proyek perubahan. Strategi ini untuk mendukung keberhasilan marketing proyek perubahan dengan cara menjalin kolaborasi yang optimal dengan *stakeholders*. Strategi marketing yang diterapkan selama proses penyusunan proyek perubahan dirumuskan dengan mengidentifikasi dan memetakan *stakeholders*. Hasil dari identifikasi dan peta *stakeholders* akan menentukan strategi agar *stakeholders* dapat mendukung proyek perubahan. Berikut merupakan pemetaan *stakeholders*;

**BAGAN 4 PETA PEMANGKU KEPENTINGAN
(Proyek Perubahan)**



Bagan 5 Peta Pemangku Kepentingan

Peta pemangku kepentingan di atas bilamana digambarkan dalam *table* beserta dengan dukungan yang diharapkan dalam pelaksanaan proyek perubahan sebagai berikut;

1. Promotors (Pengaruh Tinggi Kepentingan Tinggi)

Stakeholders	Dukungan Yang Diharapkan
Dirjen Otda Kemendagri	Mendukung proyek perubahan ini untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas metode konsultasi melalui pengembangan dan penguatan penggunaan KOVI OTDA berbasis <i>metaverse</i> .

Sesditjen Kemendagri	Otda	Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA dan dukungan komitmen seluruh Direktur dalam lingkup Ditjen Otda Kemendagri.
Direktur pada lingkup Ditjen Kemendagri	Otda	Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar <i>milestone</i> proyek perubahan jangka pendek, tengah, dan panjang dapat dipastikan terlaksana.
Kepala Subdirektorat pada lingkup Ditjen Otda Kemendagri		Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar <i>milestone</i> proyek perubahan jangka pendek, tengah, dan panjang dapat dipastikan terlaksana.

2. Latens (Pengaruh Tinggi Kepentingan Rendah)

Stakeholders	Dukungan Yang Diharapkan
Satuan kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri	Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar <i>milestone</i> proyek perubahan jangka pendek, tengah, dan Panjang dapat terealisasi pada seluruh komponen direktorat jenderal di Kementerian Dalam Negeri, dalam upaya efisiensi dan akselerasi akuntabilitas penyelenggaraan konsultasi berbasis virtual metaverse.

3. Defender (Pengaruh Rendah Kepentingan Tinggi)

Stakeholders	Dukungan Yang Diharapkan
Seluruh staf pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Mendukung pelaksanaan KOVI OTDA agar <i>milestone</i> proyek perubahan jangka pendek, tengah, dan Panjang dapat terealisasi pada seluruh komponen direktorat jenderal otonomi daerah.
Pemerintah Daerah Provinsi	Membangun komitmen dan kolaborasi di lingkup OPD terkait untuk memulai membudayakan penggunaan KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan konsultasi kepada Ditjen Otda Kemendagri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Membangun komitmen dan kolaborasi di lingkup OPD terkait untuk memulai membudayakan penggunaan KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan konsultasi kepada Ditjen Otda Kemendagri.
----------------------------------	--

4. Apathetic (Pengaruh Rendah Kepentingan Rendah)

Stakeholders	Dukungan Yang Diharapkan
Masyarakat dan LSM	Terlibat secara aktif agar mendorong dan mengawasi penyelenggaraan KOVI OTDA agar dapat terlaksana secara masif untuk di implementasikan, dan agar dapat terlibat memberitakan kebermanfaatan dan nilai-nilai positif penggunaan KOVI OTDA dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, pendekatan strategi marketing hasil proyek perubahan di susundengan metode strategi *marketing mix* yakni sebagai berikut:

1. Produk:

- a. Optimalisasi KOVI OTDA untuk mempercepat pelayanan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai wujud reformasi birokrasi dalam akselerasi pemecahan persoalan di daerah;
- b. Pengadaan *Oculus* sebagai infrastruktur pendukung KOVI OTDA.

2. Place :

Aplikasi diharapkan dapat menjangkau komponen kerja lingkup Ditjen Otda Kemendagri.

3. Promotion: menyusun strategi komunikasi dengan *stakeholder* antara lain:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan dai daerah yang menggunakan konsultasi virtual dalam rangka sosialisasi dan pemecahan masalah didaerah dan

sebagai bagian dari kolaborasi terhadap kecepatan pelaporan kondisi actual di lapangan;

- b. Lintas Komponen (Direktorat Jenderal) di Kemendagri sebagai upaya reformasi birokrasi dalam menekan upaya transaksional dalam rangka mitigasi penyalahgunaan kewenangan di level penyelenggara Pemerintahan.

2.6 RENCANA STRATEGIS TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Penyusunan proyek perubahan tidak terlepas dari berbagai peran pemangku kepentingan yang terlibat baik secara aktif maupun pasif. Pembagian tugas dengan jelas sangat membantu percepatan pelaksanaan aktivitas aksi perubahan. Pengaruh struktur tim yang terlibat dalam penyusunan proyek perubahan dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini;

Tabel 6

Susunan dan Peran Aktor yang terlibat dalam penyusunan Proyek Perubahan

No	Aktor	Peran	Uraian
1.	Dirjen Otda Kemendagri	Mentor	Berperan sebagai pembimbing dan pengarah <i>project leader</i> yang berlandaskan pada sikap profesionalisme dengan memberikan dukungan penuh dalam perancangan, memberikan persetujuan atas rancangan inovasi proyek perubahan, memantau dan memberikan timbal balik atas perkembangan proyek perubahan, dan menjadi inspirator bagi <i>project leader</i> untuk melakukan inovasi yang dilakukan.

2.	Coach	Widyaswara Ahli Utama BPSDM Kemendagri	Berperan sebagai konselor <i>project leader</i> dalam mengerjakan inovasi dan memberikan masukan yang konstruktif dalam pemetaan terhadap inovasi yang diberikan dan memberikan saran masukan bilamana terjadi kendala dalam aktualisasi saat menjalankan proyek perubahan dari <i>project leader</i>
3.	<i>Project Leader</i>	Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri	Berperan menyusun rancangan inovasi perubahan, mendelegasikan pembuatan laporan rancangan inovasi perubahan, menyelenggarakan kesepakatan dengan pemerintah daerah, Menyusun tim efektif berdasarkan tingkat proporsionalitas, memimpin eksekusi dan mengarahkan seluruh rencana agenda proyek perubahan yang telah dirancang dengan pemetaan terhadap efisiensi dan efektivitas, serta melibatkan seluruh Direktorat di lingkup Ditjen Otda untuk mendukung terciptanya pelayanan konsultasi virtual yang terintegrasi.
4.	Tim Pokja	Seluruh Kasubdit dan Kasubbag di Lingkup	Berperan untuk turut serta memberikan masukan dan

		Ditjen Otda Kemendagri	terlibat aktif dalam menindaklanjuti gagasan dan memastikan <i>Output</i> serta <i>Outcome</i> dalam Proyek Perubahan dapat terimplementasikan khususnya dalam mengawal <i>milestone</i> jangka panjang.
5.	Tim Efektif	Staf pada 5 (lima) Direktorat dalam lingkup Ditjen Otda Kemendagri	Berperan dalam mendukung <i>project leader</i> dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pada proyek perubahan dan memastikan <i>milestone</i> jangka pendek, menengah, dan Panjang dapat terlaksana.
6.	Tim Administrasi	Staf pada Sekretariat Ditjen Otda Kemendagri	Berperan mendukung dan membantu pemimpin aksi perubahan dalam kelengkapan administrasi dan dokumentasi.
7.	<i>Stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Internal : Satuan kerja lingkup Ditjen Otda Kemendagri sebagai pemberi layanan konsultasi melalui inovasi yang dirumuskan dari proyek perubahan ➤ Eksternal : Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 	Berperan dalam mendukung dan memberikan timbal balik atas proses bisnis yang mendapat nilai tambah dari tersusunnya inovasi. <i>Stakeholders</i> pada proyek perubahan

		Kabupaten/Kota sebagai pengguna layanan konsultasi berbasis digital.	
--	--	---	--

BAB III

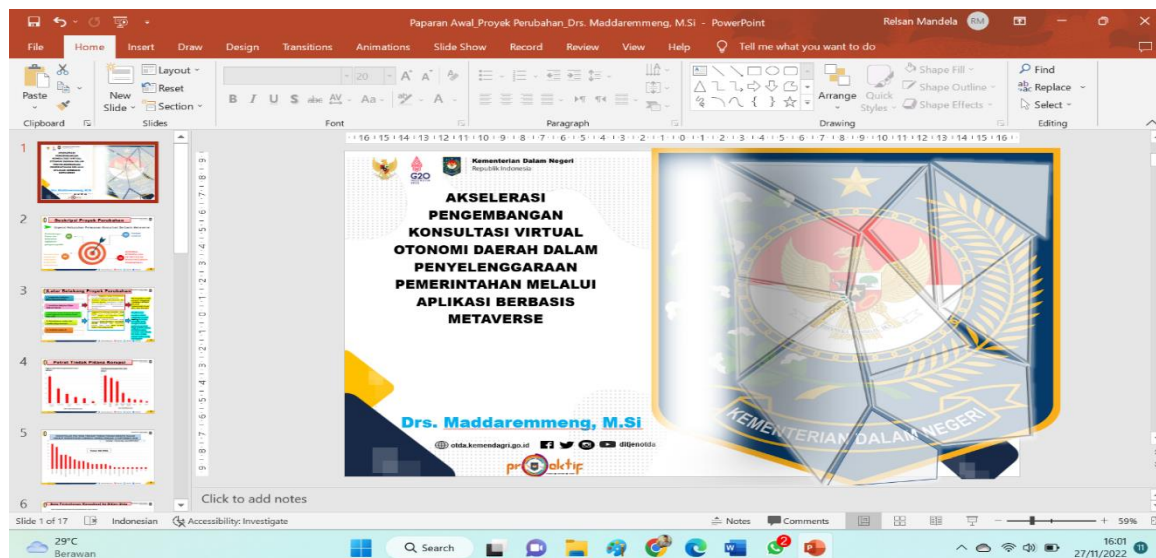
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN OUTPUT MILESTONE JANGKA PENDEK

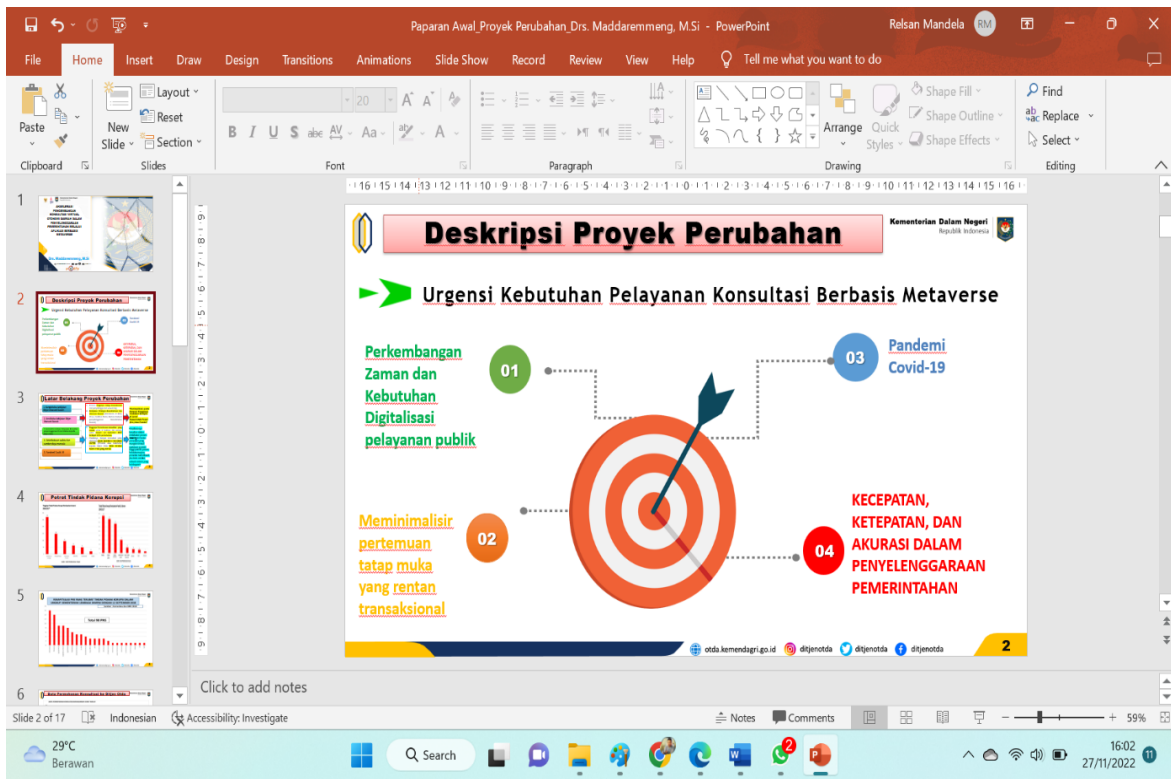
Pelaksanaan PKN Tingkat II yang dilakukan penulis dalam rangka mengimplementasikan proyek perubahan jangka pendek sejak (tanggal 19 September s.d 11 November 2022) telah berhasil menyelesaikan 8 (delapan) *milestones* atau 100% dari 8 (delapan) *milestones* jangka pendek yang direncanakan dalam Rencana Proyek Perubahan. Penjelasan rinci atas capaian *milestones* dan output yang dihasilkan sebagai berikut;

3.1 Mengkomunikasikan rencana proyek perubahan kepada Bapak Dirjen Otda selaku mentor (M3 s.d M4 September 2022)

Project leader dalam tahap awal pemilihan dan penyusunan rancangan proyek perubahan melakukan konsultasi kepada mentor sebanyak dua kali dengan tujuan agar memastikan proyek perubahan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan efektifitas dan perbaikan kinerja Ditjen Otda Kemendagri dalam menjalankan fungsinya. Ouput yang dihasilkan **Paparan Awal Proyek perubahan, Dokumentasi, Berita Acara Persetujuan mentor**, lampiran terlampir sebagaimana berikut;



Gambar 5 Paparan Awal Project Leader kepada Mentor terkait KOVI OTDA



Gambar 6 Deskripsi Proyek Perubahan Project Leader kepada Mentor terkait KOVI OTDA



Gambar 7 Konsultasi Project Leader kepada Mentor

Project Leader melakukan konsultasi kepada Mentor atas kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Tim Efektif, termasuk pihak-pihak yang akan dimintakan dukungan terhadap proyek perubahan ini. Mentor memberikan arahan antara lain;

No.	Arahan dan Masukan Mentor	Tanggapan Project Leader
1.	Merumuskan mekanisme penggunaan KOVI OTDA jika akan diimplementasikan dalam seluruh Direktorat di bawah naungan Ditjen Otda Kemendagri	Menyetujui saran dan arahan mentor
2.	Perlu adanya dukungan tertulis Direktur di bawah naungan Ditjen Otda agar pelaksanaan KOVI OTDA dapat terealisasi dilingkup Ditjen Otda.	Menyetujui saran dan arahan mentor

Upaya yang dilakukan *project leader* merupakan langkah awal sebagai upaya memastikan bahwa keberadaan KOVI OTDA diarahkan pada pendekatan penyelenggaraan pemerintahan untuk menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. *Project leader* menitikberatkan pada karakteristik pendekatan harmonisasi aktor penyelenggara pemerintahan, sehingga pada **prinsipnya terdapat beberapa nilai penting yang mengemuka yakni; kolaborasi**, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan.

3.2 Pembentukan Tim Pokja dan Tim Efektif (M1 s.d M2 September 2022)

Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor yakni Bapak Dirjen Otda Kemendagri, kemudian dilakukan tahapan pembentukan tim Pokja dan tim efektif proyek perubahan. **Output dari agenda ini berupa undangan rapat dan SK Tim Efektif Ditjen Otda.** Pembentukan Tim Efektif dilakukan sebanyak 2 (dua)

kali dengan agenda; a) Konsolidasi penetapan SDM yang akan mengisi tim efektif dengan mempertimbangkan kecakapan dan kebutuhan dalam kesuksesan pelaksanaan Proyek Perubahan dan b) penetapan rencana teknis dalam pelaksanaan proyek perubahan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 005/6100/OTDA
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :-
Hal : Undangan.

Jakarta, 31 Agustus 2022
Yth.(Daftar Nama Terlampir)
di -
Tempat

Sebagai tindak lanjut penggunaan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Metaverse (Kovi Otda Metaverse) di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa akan dilaksanakan rapat implementasi aplikasi Kovi Otda Metaverse yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 1 September 2022
Pukul : 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ditjen OTDA Lantai 8 Gedung F Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7
Pimpinan Rapat : Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui saudara Taufan Fernandes, S.STP Nomor Handphone 0821-7754-0654.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Drs. Maddaremeng, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197009201991011001

Tembusan:
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Gambar 8 Undangan rapat penyusunan tim teknis



Gambar 9 Rapat pembentukan tim teknis

Rapat pembentukan tim teknis, dipimpin langsung oleh *project leader* dan di hadiri oleh seluruh perwakilan Direktorat di lingkup Ditjen Otda Kemendagri dan menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti yang tertuang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Poin-Poin Penting Penyusunan Tim Efektif

No.	Asal Peserta	Masukan/Persetujuan
1.	Bagian Umum Otda	Pada Prinsipnya Bagian Umum siap mendukung proyek perubahan Project Leader. Untuk pengadaan alat oculus untuk Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pengadaan alat oculus sebanyak 6 buah yang akan dibagi kepada 5 (lima) Direktorat di lingkup Ditjen Otda dan 1 (satu) akan ditempatkan di sekretariat.

2.	Bagian Perencanaan	Siap mendukung agenda project leader dalam simulasi dan sosialisasi penggunaan KOVI OTDA pada daerah percontohan yang akan dibahas secara teknis dalam rapat teknis.
3.	Direktorat PD, Otsus, dan DPOD	Mendukung proyek perubahan untuk dapat di implementasikan secara menyeluruh pada setiap Direktorat di lingkup Ditjen Otda dengan pertimbangan beban pekerjaan yang tinggi yang melekat pada direktorat ini dapat terbantu dengan kehadiran KOVI OTDA karena konsultasi dapat dilakukan dimana pun tanpa memperhatikan jarak geografis. Pada Prinsipnya Direktorat PD, Otsus, dan DPOD siap menugaskan stafnya sesuai dengan kebutuhan <i>project leader</i> .
4.	Direktorat FKDH	Mendukung proyek perubahan <i>project leader</i> untuk mengimplementasikan KOVI OTDA untuk diterapkan pada seluruh komponen direktorat Ditjen Otda.
5.	Direktorat FKKPD	Mendukung penuh ide dan gagasan <i>Project Leader</i> , keberadaan KOVI OTDA dirasa belum optimal digunakan. Pasca peresmian KOVI OTDA bulan maret lalu penggunaan KOVI OTDA tidak masif dilakukan, direktorat FKKPD telah memberikan pelatihan secara khusus kepada beberapa staf untuk mendalami penggunaan KOVI OTDA berbasis metaverse secara menyeluruh.
6.	Direktorat PHD	Mendukung proyek perubahan <i>project leader</i> untuk mengimplementasikan KOVI

		OTDA untuk diterapkan pada seluruh komponen direktorat Ditjen Otda.
7.	Direktorat EKPKD	Mendukung proyek perubahan <i>project leader</i> untuk mengimplementasikan KOVI OTDA untuk diterapkan pada seluruh komponen direktorat Ditjen Otda.

Berdasarkan hasil kesepakatan secara bulat dalam rapat pertama disepakati bahwa terdapat komitmen yang sama untuk segera membentuk tim efektif guna menunjang kegiatan Proyek Perubahan. Pembentukan tim ini dalam proyek perubahan telah mendapat pengesahan secara mandatori yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 068.05-5561 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah, dengan maksud dan tujuan mengatur perencanaan, pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur yang efisien dan efektif sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya serta memberikan jaminan kelancaran pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam mensukseskan pelaksanaan KOVI OTDA. SK tim proyek perubahan terlampir sebagai berikut;



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat telpon (021) 3453492
Website: <http://www.kemendagri.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
NOMOR 068.05-5561TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN
AKSELERASI PENGEMBANGAN APLIKASI KONSULTASI VIRTUAL
OTONOMI DAERAH**

- DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,**
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa pandemi Covid19 maka perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital;
- b. bahwa konsultasi virtual melalui platform metaverse adalah bentuk terobosan penggunaan teknologi digital dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa konsultasi virtual dengan penggunaan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada huruf b diwujudkan dalam proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Gambar 10 SK Tim Proyek Perubahan



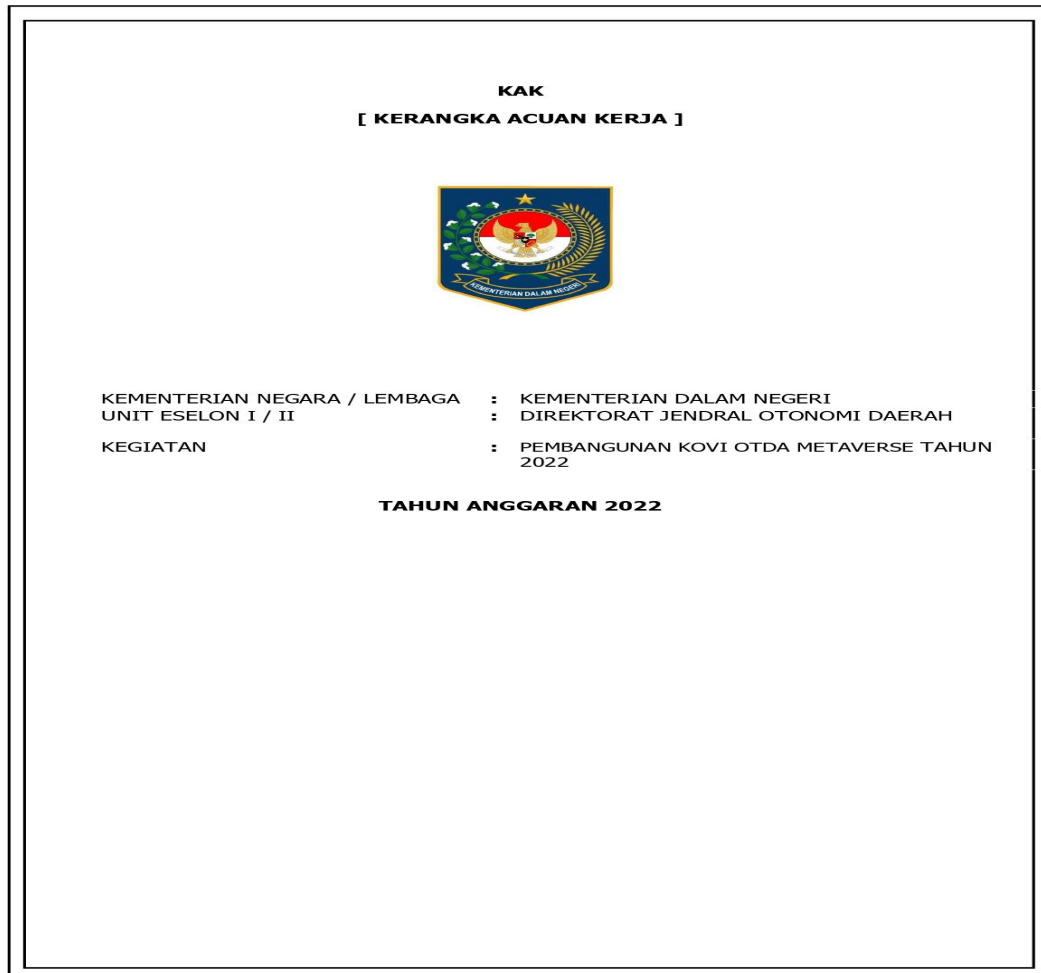
Gambar 11 Perumusan rencana teknis dalam implementasi proyek perubahan

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di atas telah ditentukan pemetaan terhadap tugas teknis tim efektif yang menjadi rincian tugas pokok dari Tim adalah sebagai berikut:

- a. Menelusuri Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat di jadikan sebagai daerah percontohan dan uji coba pelaksanaan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.
- b. Mengkoordinasikan, memonitoring dan melaksanakan uji coba pelaksanaan sosialisasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah dalam lingkup Ditjen Otda dan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Membantu *project leader* untuk berkoordinasi dengan Direktorat di lingkup Ditjen Otda dalam perumusan kebutuhan dan masukan terhadap akselerasi pemanfaatan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.
- d. Menyusun strategi dan rencana perbaikan sebagai tindaklanjut dari hasil pelaksanaan uji coba Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.
- e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada *project leader*.

3.3 PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGEMBANGAN PENGGUNAAN KONSULTASI VIRTUAL OTONOMI DAERAH (M4 September s.d M1 Oktober 2022)

Project leader pada tahap ketiga menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut TOR, untuk di masukan pada agenda kegiatan Tahun anggaran 2023. KAK KOVI OTDA ditujukan untuk memastikan ke depan bahwa agenda konsultasi secara virtual berbasis *metaverse* dapat di implementasikan di lingkup Ditjen Otda. **Ouput yang dihasilkan KAK Pengembangan Penggunaan KOVI OTDA dan undangan rapat internal** sebagai berikut;



Gambar 12 KAK KOVI OTDA I

3. Pengujian Sistem
 - a. *Review* kode program.
 - b. Tes kinerja aplikasi untuk menguji fungsionalitas aplikasi.
4. Implementasi
 - a. Update dan konfigurasi Aplikasi Kovi Otda pada *production server* di Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Pengujian akhir terhadap fungsionalitas aplikasi kovi otda pada *server production* sebelum digunakan

VII. HASIL PEKERJAAN

Adapun hasil atau *output* kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jendral Otonomi Daerah yaitu:

1. Aplikasi Kovi Otda, sesuai dengan ruang lingkup pada KAK (Kerangka Acuan Kerja).
2. Dokumentasi kegiatan yang dapat di detailkan pada rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan pelaksanaan pekerjaan
 - b. Buku manual penggunaan aplikasi
 - c. Video tutorial penggunaan aplikasi

VIII. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

IX. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Tahun 2022 ini adalah 90 hari sejak kontrak ditandatangani.

X. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda adalah sebesar **Rp. 99.000.000,-** (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

XI. PELAPORAN

Pembuatan dokumen laporan oleh Penyedia Barang / Jasa adalah berdasarkan hasil dari setiap tahapan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda. Laporan yang diserahkan meliputi:

Gambar 13 KAK KOVI OTDA II

Pada tahap pertama penyusunan KAK *Project Leader* bersama tim efektif berkoordinasi dengan seluruh direktorat dalam lingkup Ditjen OTDA untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi kebutuhan yang diperlukan, terdapat beberapa hal yang mengemuka dalam penyusunan KAK di antaranya; *pertama*, bahwa perlu ada kesepakatan tertulis atau sebuah regulasi tertentu yang menjelaskan kriteria tertentu urusan-urusan apa saja yang dapat dikonsultasikan secara virtual dan konsultasi dengan topik seperti apa yang perlu konsultasi secara langsung. *Kedua*, substansi dalam KAK harus memuat setidaknya urgensitas dan kebutuhan serta alur mekanisme pelayanan konsultasi virtual sebagai bagian dari justifikasi urgensi kebutuhan pelayanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah sebagai salah satu alternatif jalur konsultasi antara Kemendagri Ditjen Otda Kemendagri dengan Pemerintah Daerah.



Gambar 14 Penyusunan KAK KOVI OTDA

3.4 PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMDA TERKAIT PENGGUNAAN KOVI OTDA (M2 s.d M3 Oktober 2022)

Tahapan *milestone* ke empat dalam tahapan jangka pendek adalah Penerbitan Surat Pemberitahuan Kepada Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan KOVI OTDA. Proses penerbitan Surat Pemberitahuan penggunaan KOVI OTDA sebelumnya telah dikonsultasikan secara intensif oleh *project leader* dengan Mentor selaku Dirjen Otda dan Sekjen Kemendagri selaku Plh. Dirjen Otda. Penerbitan Surat Pemberitahuan untuk memastikan bahwa program KOVI OTDA tersosialisasi kepada Pemerintah Daerah. Surat Pemberitahuan dimaksud dapat dilihat pada bagian di bawah ini;



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 067/6483/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Aplikasi Layanan
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah
Metaverse (KOVI OTDA METAVERSE)
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jakarta, 15 Oktober 2022
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/ Walikota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mengurangi pertemuan langsung secara fisik dalam rangka meminimalisir Praktek Transaksional dan dalam rangka mewujudkan sistem Pemerintahan yang transparan, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mendukung proses percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik di Era Society 5.0, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah membuat Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah berbasis Metaverse (KOVI OTDA METAVERSE) yang ditujukan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. Adapun layanan Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah dibuka setiap hari Kerja mulai dari Pukul 09.00-15.30 WIB dengan terlebih dahulu mendaftar di alamat website <http://koviotda.kemendagri.go.id>.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan para Gubernur dan Bupati/Walikota agar menyampaikan informasi ini ke Perangkat Daerahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

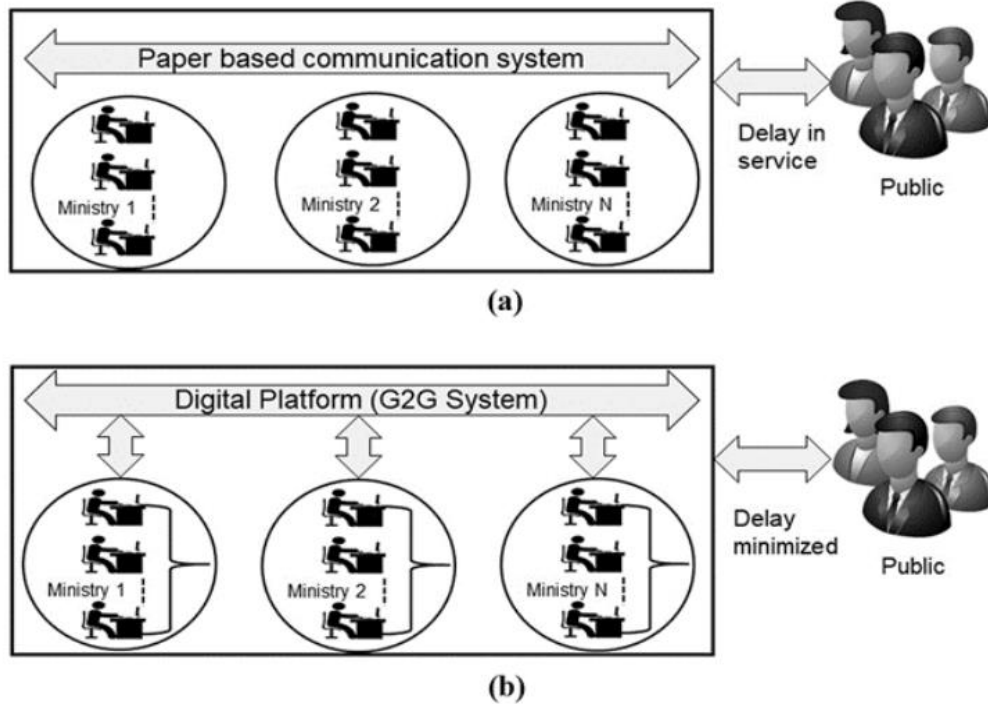
Gambar 15 SE Penguasaan KOVI OTDA dalam rangka konsultasi

Penggunaan KOVI OTDA merupakan salah satu langkah maju dalam mengimplentasikan kolaborasi antara Government to Government (G2G). Konteks KOVI OTDA yang digagas oleh *project leader* merupakan manifestasi dalam marwah konsep G2G. G2G dalam hemat *project leader* merupakan tulang punggung pemerintahan elektronik karena pemerintah pusat akan mengandalkan informasi dalam ruang virtual untuk mendapatkan masukan atau keluhan dan gambaran kondisi terkini yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan. Interaksi dalam G2G adalah berbagi dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah atau antar tingkat pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan koordinasi secara daring, dan penyimpanan arsip

pemerintah secara daring. G2G adalah penting dalam rangka berbagi data dan melakukan pertukaran elektronik antar aktor pemerintah, yang melibatkan baik pertukaran antar lembaga di tingkat nasional, maupun pertukaran antar lembaga-lembaga tingkat nasional, provinsi, dan lokal. *Project leader* menitikberatkan konsep G2G sebagai bagian dari komunikasi dalam pemerintahan secara elektronik.

Lebih lanjut G2G merupakan bentuk administrasi-elektronik (*e-administration*), sebagai contoh dari G2G adalah memantapkan dan menggunakan “gudang data umum” (*a common data warehouse*). Karakteristik dominan dari G2G adalah komunikasi, koordinasi, standarisasi informasi dan layanan. Menurut G2G merupakan interaksi elektronik antara berbagai cabang pemerintahan. G2G berkaitan dengan berbagi data dan melakukan pertukaran elektronik antar instansi pemerintahan. Konsep KOVI OTDA setidaknya mendukung konsep keterhubungan antar level pemerintahan dalam penguatan kolaborasi pemerintahan. Membandingkan fenomena model komunikasi sejauh ini dan model komunikasi yang diharapkan di masa datang yang mempengaruhi pemberian layanan oleh pemerintah kepada publik. Model komunikasi modern sangat cocok untuk pemerintahan di era pemerintahan berbasis elektronik sekarang ini dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 2.6. Model Komunikasi Tradisional dan Modern



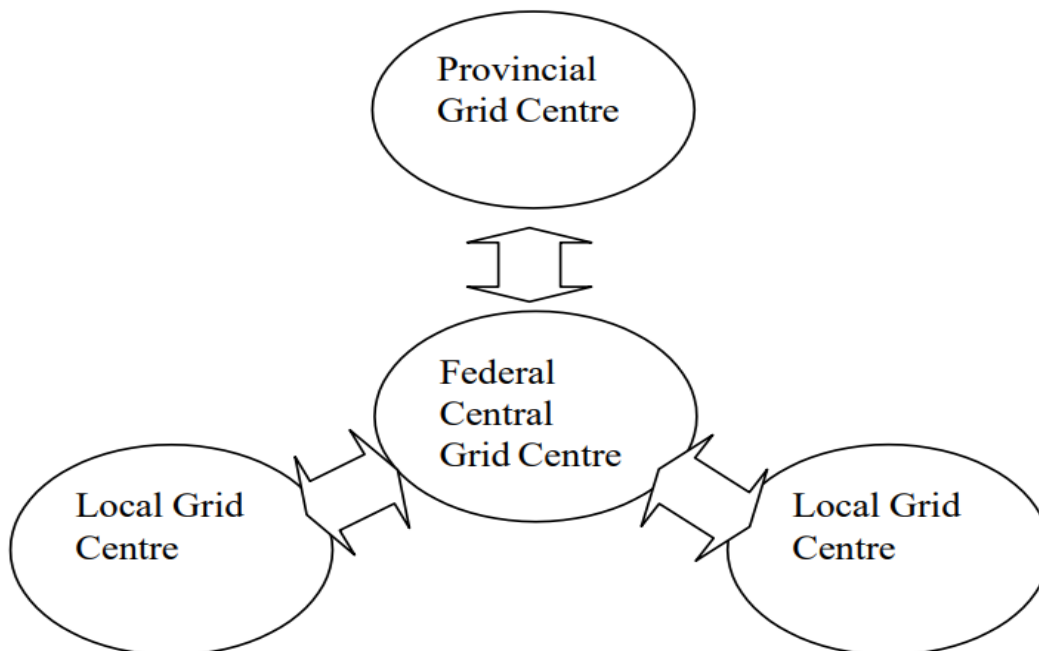
Bagan 5 Pola Komunikasi Modern dan Tradisional

Selanjutnya *project leader* memposisikan keberadaan KOVI OTDA sebagai sebuah mata rantai untuk menghubungkan antara pusat jaringan provinsi, dua pusat jaringan lokal yang terhubung dengan ke pusat jaringan Inti (Pemerintah Pusat). Infrastruktur jaringan e-government tiga tingkat telah dikembangkan dengan menggunakan model e-government interaktif. Model kolaborasi pusat inti yang menghubungkan pusat jaringan lokal dibawahnya setidaknya menunjukkan sistem komunikasi dan kolaborasi jaringan tiga tingkat untuk tiga tingkat pemerintahan dapat menjamin efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Simpul jaringan divisi yang terhubung ke pusat jaringan sementara dan pusat jaringan provinsi terhubung ke pusat jaringan pemerintah pusat. Bagan kolaborasi tersebut juga merupakan dapat juga menjadi justifikasi kebutuhan jangka panjang dalam proyek perubahan ini yakni menjadikan KOVI OTDA sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan layanan digital lain dilingkup komponen Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut dalam fitur KOVI OTDA ke depan berdasarkan masukan yang *project leader* perlu melakukan penambahan

fitur seperti fitur pengesahan dan atau keabsahan hasil konsultasi. Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud diatas tertuang pada bagan di bawah ini:

Gambar 2.5. Struktur Pemerintahan Elektronik Hubungan antarTingkatan Pemerintahan



Sumber: Haque et al. (2013:14)

Bagan 6 struktur pemerintahan elektronik hubungan antar tingkatan pemerintahan

3.5 PENETAPAN STANDAR ALUR PELAYANAN KOVI OTDA (M2 s.d M3 OKTOBER 2022)

Milestone ke 5 (lima) dalam proyek perubahan ini adalah menyusun panduan teknis Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA. Kondisi existing project leader dan tim efektif telah menyusun panduan teknis prosedur Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA. Hal ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya kejelasan dalam prosedur mekanisme Penetapan Standar Alur Pelayanan dan pelaksanaan KOVI OTDA. **Ouput dari milestone ini adalah Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA.**

Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA yang dirumuskan oleh *project leader* diharapkan menjadi suatu pedoman, bagaimana ASN dilingkup Ditjen Otda dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi diruang virtual berbasis metaverse. Implikasinya permintaan konsultasi dapat termonitor

dengan baik sehingga dalam perumusan waktu konsultasi dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA ini telah dikonsultasikan dengan beberapa pemangku kepentingan, setelah didapat rekomendasi dan dukungan dari Mentor dan Direktur di lingkup Ditjen Otda maka dilanjutkan dengan penyusunan mekanisme penyusunan Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA. Penyusunan mekanisme tersebut dilakukan bersama Tim Efektif, mekanisme tersebut telah rampung sesuai jadwal yaitu pada minggu ke-3 bulan Oktober. Pada praktiknya implementasinya proyek perubahan ini menghasilkan sebuah *product* yakni mekanisme Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA, sebagai berikut;



Gambar 16 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA

Registrasi Kovi Otda

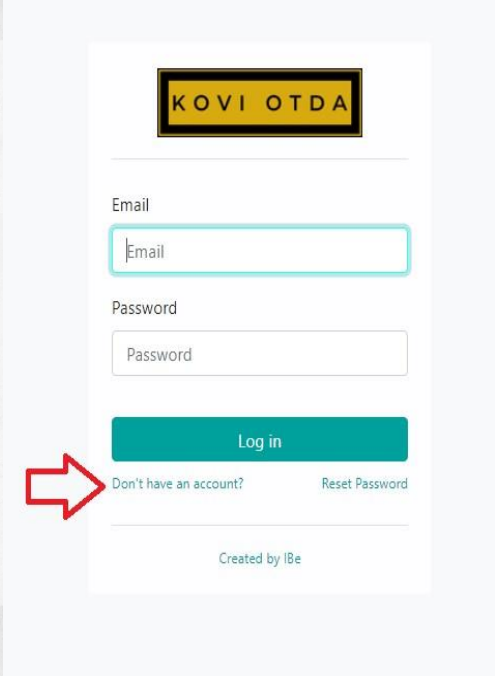
Link Pendaftaran

<http://koviotda.kemendagri.go.id/>

Gambar 17 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Tampilan Antar Muka Registrasi

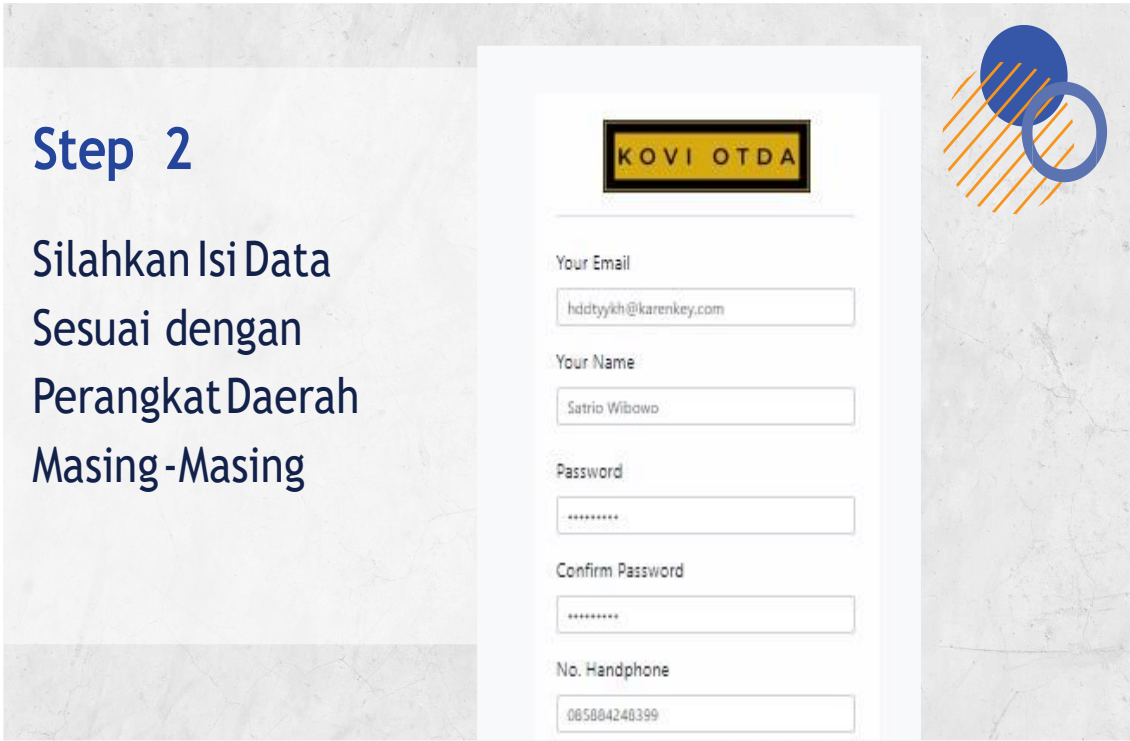
Step 1

Setelah Mengunjungi Laman Website Kovi Otda, Silahkan Klik "Don't Have an Account?"



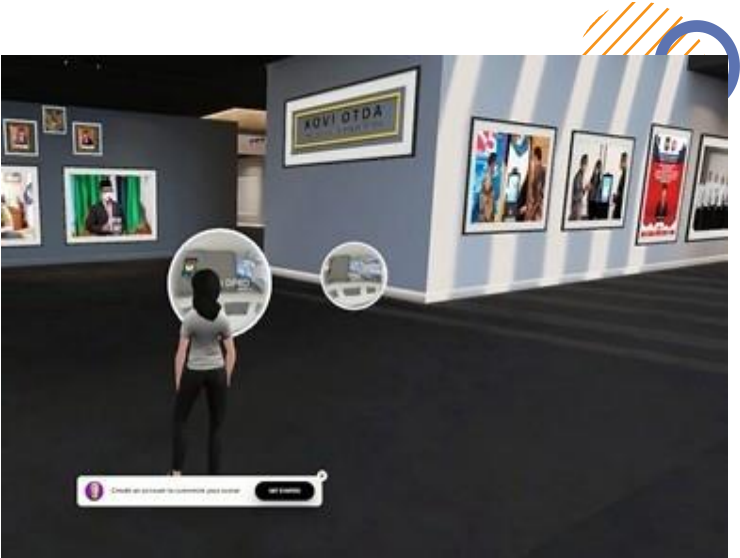
The screenshot shows the KOVI OTDA registration interface. At the top is the KOVI OTDA logo. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. A teal 'Log in' button is positioned below the password field. Underneath the button are two links: 'Don't have an account?' and 'Reset Password'. A red arrow points to the 'Don't have an account?' link. At the bottom of the form, it says 'Created by lBe'.

Gambar 18 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Tampilan Awal



Gambar 19 Panduan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA Pembuatan Akun

Selamat Datang di Metaverse



Gambar 20 Tampilan Beranda Awal Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

3.6 PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PELAYANAN KOVI OTDA (M3 s.d M4 Oktober 2022)

Milestone ke 6 (enam) dalam proyek perubahan ini adalah pengadaan alat pendukung pelayanan KOVI OTDA. Output dari *milestone* agenda ini adalah alat “oculus” yang diberikan kepada 5 (lima) Direktorat di lingkup Ditjen Otda. **Ouput dari milestone ini adalah terdapatnya alat oculus pada setiap direktorat di lingkup Ditjen Otda.** Oculus merupakan alat dengan mengedepankan teknologi *virtual reality* yang dapat digunakan untuk mengadakan acara secara online. Meski hanya di dunia virtual, penyelenggaraan acara bisa tetap interaktif. *Virtual reality* dapat menghadirkan bidang pandang yang seakan nyata, sehingga konten lebih memukau dan menarik, fasilitas yang diberikan alat oculus dalam menunjang kegiatan KOVI OTDA menciptakan ruang konsultasi menjadi “nyata” meskipun hanya bertemu dalam ruang dunia metaverse.

Pemberian alat oculus telah dilaksanakan sebagaimana jadwal perencanaan yang telah disusun di awal penyusunan proyek perubahan. Alat oculus telah diberikan ke 5 (lima) Direktorat di lingkup Ditjen Otda. Hal ini sebagai bentuk komitmen *project leader* dalam memastikan proyek perubahan dapat terimplementasi pada seluruh direktorat di lingkup Ditjen Otda Kemendagri. Inisiasi ke depan untuk Tahun 2023 project leader telah memasukkan dalam perencanaan dan penganggaran untuk pengadaan alat oculus yang berjumlah 25 (dua puluh lima) yang nantinya di bagikan kepada seluruh masing-masing subdirektorat di lingkup Ditjen Otda. Foto dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 21 Penyerahan alat oculus kepada Direktur PDOD



Gambar 22 Penyerahan alat oculus kepada Direktur FKKPD



Gambar 23 Penyerahan alat oculus kepada Direktur FKDH



Gambar 3.20 Penyerahan alat oculus kepada Direktur PHD

3.7 DUKUNGAN DAN KOMITMEN TERTULIS DIRJEN OTDA DAN SELURUH DIREKTUR DALAM LINGKUP DITJEN OTDA (M3 OKTOBER S.D M2 NOVEMBER 2022)

Milestone ke 7 (tujuh) dalam proyek perubahan ini adalah pengadaan penerbitan dukungan dan komitmen tertulis dari para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkup Ditjen Otda. **Output yang dihasilkan berupa dokumen tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat di lingkup Ditjen Otda.**

Dokumen komitmen yang diserahkan merupakan bentuk penguatan kerjasama antar instansi pemerintah yang sampai detik ini dianggap masih sangat kurang. Sinergisme dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih sangat minim. Hal ini membuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government* di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkan pelayanan dan koordinasi secara terintegrasi satu pintu. Proses kolaboratif dan kepemimpinan bersama masih kerap diabaikan karena ego sektoral. Pada masa New Normal nanti, sinergitas dan koordinasi antar lembaga sangatlah dibutuhkan, akses ke kantor-kantor institusi pemerintah akan dibatasi, bilamana penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya memuat konsultasi tetap diberlakukan secara konvensional tidak dialihkan kepada pelayanan berbasis elektronik secara terpadu, maka hal dipastikan menghambat jalannya pemerintahan.

Para pemangku kepentingan harus merombak dan mengoptimalisasikan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal berbasis elektronik, melalui surat dukungan ini sebagai langkah awal wujud sinergitas dan kolaborasi serta kesatupaduan komitmen yang sama di lingkup pejabat eselon 1 dan eselon 2 lingkup Ditjen Otda. Berikut *project leader* lampirkan surat pernyataan dukungan penggunaan KOVI OTDA;



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3453402
Faksimile (021)3453402 www.kemendagri.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2913/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME
Jabatan : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian
Perangkat Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dr. Cheka Virgowansyah, S,STP, ME

Gambar 25 Surat dukungan Direktur FKKPD penggunaan KOVI OTDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3453492
Faksimile (021)3453492 www.Kemendagri.go.id.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2914/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si
Jabatan : Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus &
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.


Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si

Gambar 26 Surat dukungan Direktur PDOD penggunaan KOVI OTDA

3.8 UJI COBA LAYANAN KOVI OTDA DI LINGKUP DITJEN OTDA KEMENDAGRI (M4 OKTOBER S.D M2 NOVEMBER 2022)

Milestone ke 8 (delapan) dalam proyek perubahan ini adalah kegiatan uji coba pada lingkup komponen di internal Ditjen Otda Kemendagri. **Ouput yang dihasilkan adalah laporan kesiapan ASN dilingkup ditjen Otda dalam penggunaan KOVI OTDA dan foto dokumentasi.** Pelaksanaan uji coba di lingkup internal ditjen Otda dihadiri oleh beberapa pejabat struktural eselon 3 dan pejabat fungsional di lingkup Ditjen Otda. Pasca terbitnya dokumen dan komitmen dari masing-masing direktur di lingkup Ditjen Otda, *project leader* mengadakan uji coba penggunaan alat oculus dan KOVI OTDA, hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan keberadaan KOVI OTDA sekaligus sebagai bentuk *brainstorming* persiapan penggunaan KOVI OTDA secara menyeluruh pada Tahun 2023 pada lingkup Ditjen Otda.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus pemahaman teknis cara penggunaan KOVI OTDA dalam proses konsultasi, berdasarkan hasil uji coba penerapan terdapat beberapa kendala yang ditemukan, dan bersamaan dengan hal tersebut *project leader* bersama tim efektif telah merumuskan solusi dalam menanggulangi kendala tersebut sebelum pada Tahun anggaran 2023 KOVI OTDA akan diberlakukan secara menyeluruh. Daftar kendala dan solusinya dapat terlihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 7 Daftar kendala dan solusi persiapan pelaksanaan KOVI OTDA untuk Tahun Anggaran 2023

No.	Kendala yang dihadapi	Solusi yang dapat dilaksanakan
1.	Masih banyak ASN yang belum memahami secara fasih penggunaan alat oculus.	➤ Perlu ada pembekalan dan pelatihan penggunaan alat oculus kepada pegawai dilingkup Ditjen Otda

		➤ Perlu menunjuk PIC/penanggung jawab khusus pada setiap subdirektorat untuk memfasilitasi secara teknis proses konsultasi virtual
2.	Alat oculus yang tersedia dinilai tidak ramah untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena dalam beberapa kasus tertentu ditemukan menimbulkan efek samping di antaranya; pusing dan otot mata berkedut.	<i>Project leader</i> bersama tim efektif dan Kabag Umum Ditjen Otda telah menemukan alat sejenis oculus yang lebih ramah yakni Hololens untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan telah disepakati pengadaan yang akan diberikan kepada seluruh subdirektorat pada Tahun anggaran 2023.
3.	Penggunaan KOVI OTDA berbasis <i>metaverse</i> membutuhkan akses internet yang stabil, kondisi existing hal tersebut belum tersedia setiap saat.	<i>Project Leader</i> telah bersepakat dengan Kabag Umum dan Kabag Perencanaan untuk tahun 2023 akan ada penguatan akses internet pada setiap ruangan Kepala Subdirektorat di lingkup ditjen Otda untuk memastikan konsultasi virtual yang dilakukan menggunakan layanan KOVI OTDA berjalan lancar.



Gambar 27 Uji coba internal I penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda



Gambar 28 Uji coba internal II penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda



Gambar 29 Uji coba internal III penggunaan KOVI OTDA di lingkup Ditjen Otda

B. CAPAIAN OUTPUT MILESTONE JANGKA MENENGAH

Pelaksanaan PKN Tingkat II yang dilakukan penulis dalam rangka mengimplementasikan proyek perubahan jangka menengah sejak (tanggal 19 September s.d 11 November 2022) telah berhasil menyelesaikan 2 (dua) *milestones* atau 100% dari 2 (dua) *milestones* jangka menengah yang direncanakan dalam Rencana Proyek Perubahan. Penjelasan rinci atas capaian *milestones* dan output yang dihasilkan sebagai berikut;

3.9 PENETAPAN PEMKOT MAKASSAR SEBAGAI DAERAH PERCONTOHAN PENGGUNAAN KONSULTASI BERBASIS METAVERSE

Milestone ke 9 (sembilan) dalam proyek perubahan ini adalah kegiatan uji coba pada lingkup komponen di internal Ditjen Otda Kemendagri. **Output yang dihasilkan adalah Dokumentasi layanan konsultasi dan laporan hasil ujicoba.** Pemilihan Kota Makassar sebagai daerah percontohan berdasarkan

hasil riset dari *project leader* dan tim efektif yang disertai dengan konfirmasi oleh Kadis Kominfo Kota Makassar bahwa Kota Makassar memiliki program yang serupa dengan KOVI OTDA dengan nama “*Makaverse*” yang berarti Makassar Kota Metaverse. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut kemampuan adaptasi yang mumpuni. Kota Makassar sudah memiliki pondasi menuju Kota berbasis pada Metaverse, yakni dengan penerapan *sistem Sombere and Smart City*. Dalam rangka optimalisasi hal tersebut membutuhkan koordinasi yang apik, utamanya di lingkup Pemkot Makassar, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Kementerian/Lembaga terkait termasuk di dalamnya Kemendagri.

Pemilihan Kota Makassar setidaknya menegaskan 2 (dua) hal penting, *pertama* bahwa era kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan khususnya dalam penguatan kolaborasi antar level pemerintahan. *Kedua*, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa perlu ada alternatif lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dibidang konsultasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, komunikasi antar level pemerintahan tidak selalu bergantung pada model komunikasi konvensional yang mengharuskan pertemuan tatap muka oleh karenanya dibutuhkan perubahan pola pikir untuk turut serta memanfaatkan arus teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil kegiatan uji coba KOVI OTDA menghasilkan beberapa poin penting yang tertuang dalam laporan rapat dengan pokok-pokok inti sebagai berikut;

- a. Pemkot Makassar pada prinsipnya mendukung penyelenggaraan KOVI OTDA berbasis *metaverse*, dan kondisi existing Kota Makassar sedang dalam tahap pengembangan Kota Metaverse dengan penguatan sarana dan prasarana pendukung di antaranya, penguatan koneksi jaringan 5G, pengadaan Oculus untuk tahun anggaran 2023, dan penyiapan tempat-tempat khusus yang dapat mengakses layanan berbasis *metaverse*, dan sebagainya.
- b. Penggunaan layanan pemerintahan berbasis *metaverse* salah satunya dapat berwujud pada konsultasi virtual harus menjamin keamanan data tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Perlu ada pelatihan secara menyeluruh kepada ASN penyelenggara Pemerintahan baik ditingkat Pusat dan Daerah untuk memahami mekanisme kerja layanan berbasis *metaverse* secara berkala. Sehingga jika dibutuhkan perlu membuat kesatuan tim ahli penggunaan *metaverse* yang melekat pada masing-masing komponen dalam tahap awal pengembangan dan pembiasaan penggunaan *metaverse* dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- d. Diperlukan pengaturan teknis untuk mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikonsultasikan secara virtual, lebih lanjut kaitannya dengan KOVI OTDA bahwa perlu ada pengaturan dalam menjelaskan mekanisme pengesahan dokumen apakah dapat dilakukan di dalam fitur layanan berbasis *metaverse* yang di tawarkan.



Gambar 30 Uji coba penggunaan I KOVI OTDA bersama Pemkot Makassar



Gambar 31 Uji coba penggunaan II KOVI OTDA bersama Pemkot Makassar



Gambar 32 Tampilan Ruang Metaverse I bersama Pemkot Makassar



Gambar 33 Tampilan Ruang Metaverse II bersama Pemkot Makassar



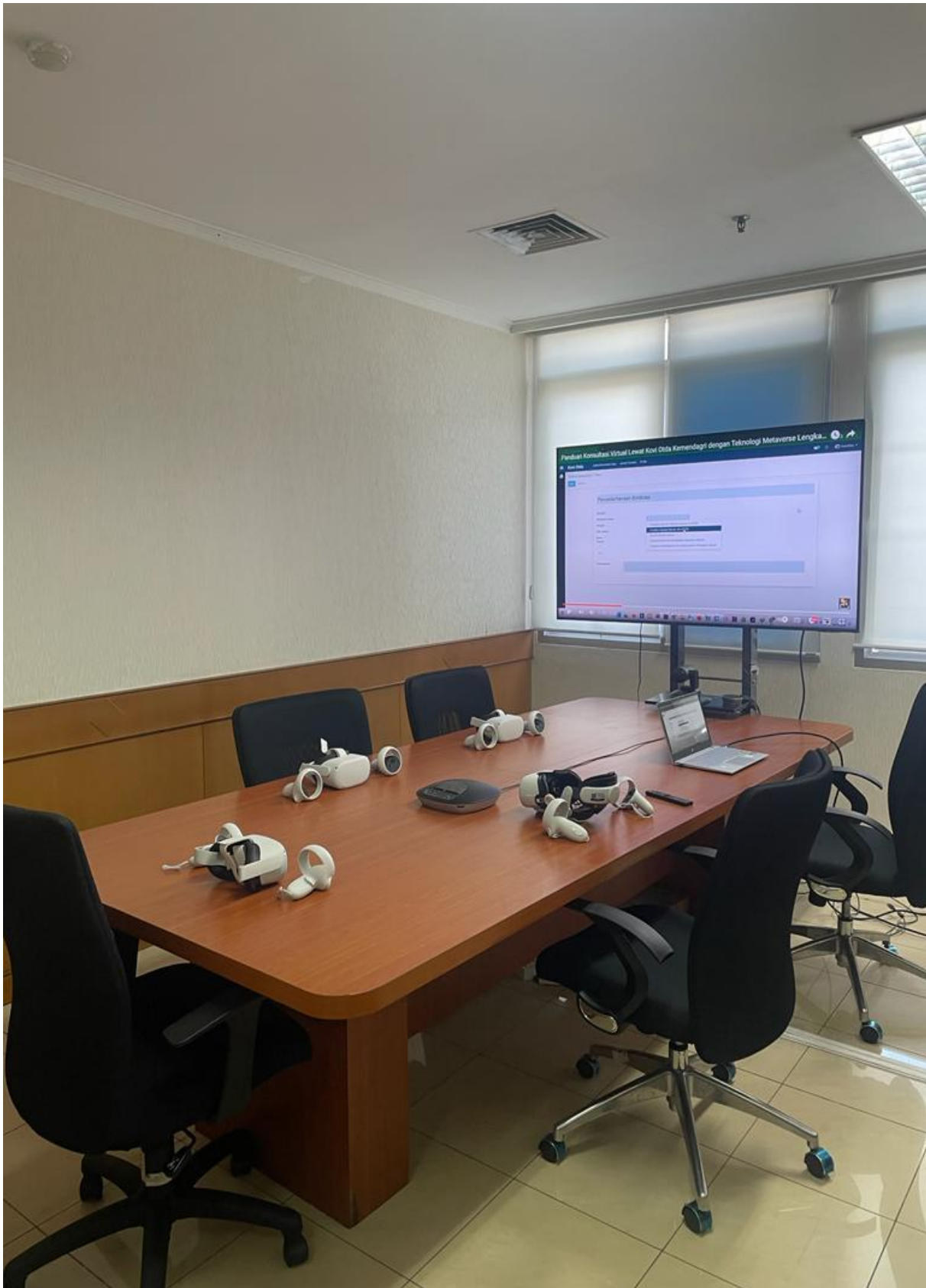
Gambar 34 Tampilan Ruang Metaverse III bersama Pemkot Makassar

3.10 PENYIAPAN RUANGAN KHUSUS PENGGUNAAN KOVI OTDA

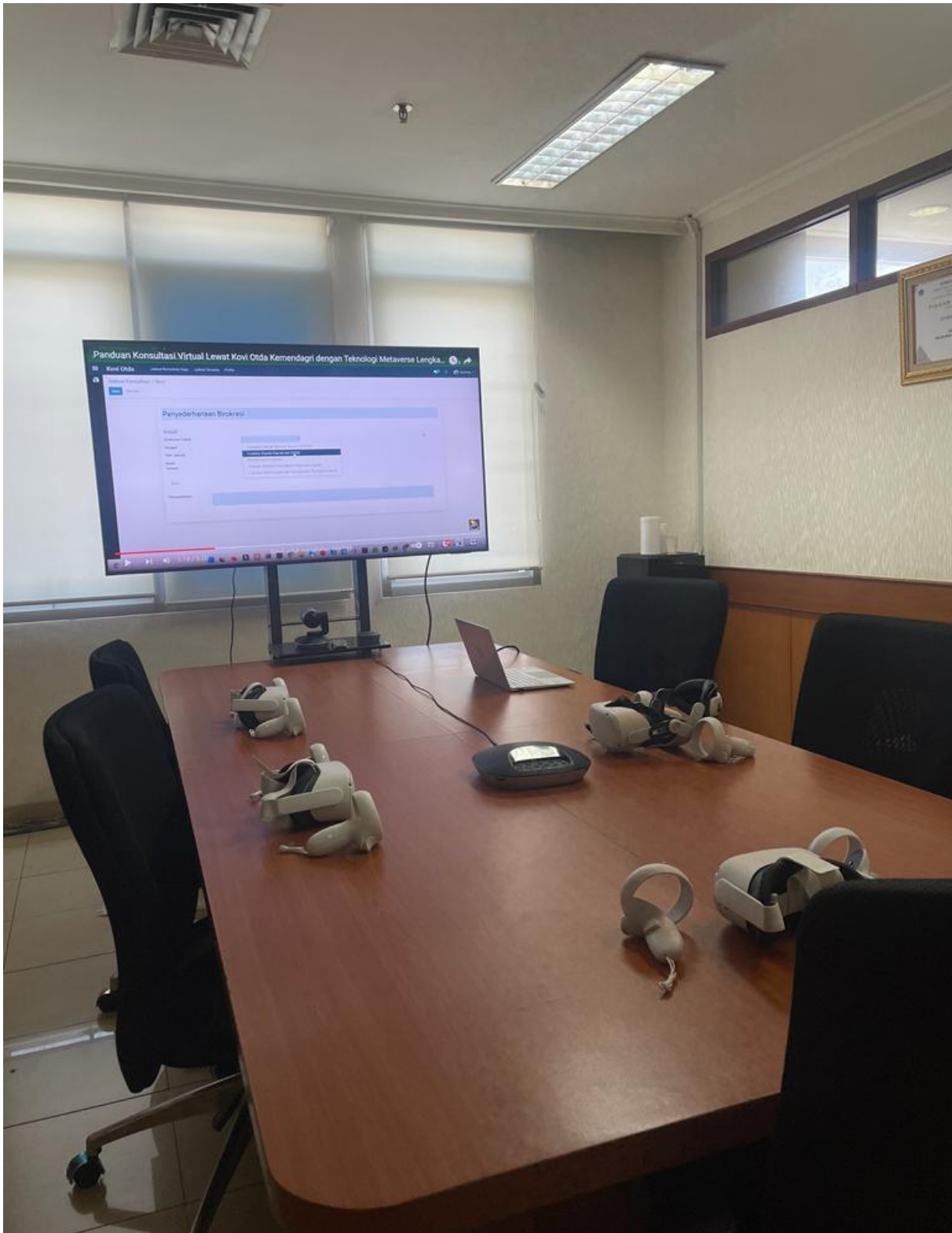
Milestone ke 10 (sepuluh) dalam proyek perubahan ini adalah kegiatan uji coba pada lingkup komponen di internal Ditjen Otda Kemendagri. **Ouput yang dihasilkan adalah ruangan khusus Konsultasi Virtual KOVI OTDA.** Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh *project leader* bersama tim efektif berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Otda untuk mempersiapkan ruangan khusus yang akan ditempati oleh Pemerintah Daerah bilamana ingin melakukan konsultasi jika dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah telah hadir di Jakarta.

Kehadiran ruang khusus dalam rangka optimalisasi penggunaan KOVI OTDA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyiapan sumber daya manusia aparatur yang melek teknologi dan kesiapan perubahan budaya kerja menuju arah digitalisasi. Kesiapan ruangan ini didalamnya memuat koneksi internet, alat oculus, layar monitor. Berdasarkan hasil konsolidasi Project Leader dengan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Otda ruang yang di pilih terletak di Lantai 8 Gedung F Kemendagri yang letaknya persis disebelah ruang rapat utama Ditjen Otda, dan hal ini juga telah mendapat persetujuan Mentor yang merupakan Dirjen Otda Kemendagri.

Ruangan khusus dimaksud kondisi existing dalam posisi siap untuk digunakan dan dioperasionalisasikan secara penuh pada Tahun 2023. Berikut foto ruangan khusus yang diproyeksikan sebagai ruangan KOVI OTDA yang akan digunakan dilingkup Ditjen Otda Kemendagri;



Gambar 36 Ruang Khusus I Penggunaan KOVI OTDA



Gambar 37 Ruang Khusus II Penggunaan KOVI OTDA

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai peran untuk memberikan layanan konsultasi kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam upaya menjalankan peran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja. Proyek perubahan dengan judul *Akselerasi Pengembangan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Aplikasi Berbasis Metaverse*. Semua hal yang dilakukan dalam Proyek perubahan diyakini akan menjadi pondasi dalam keberlanjutan Program Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA) yang merupakan bagian dari upaya penguatan kolaborasi pemerintahan (G2G) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dalam memudahkan mekanisme konsultasi dengan memanfaatkan teknologi guna meminimalisir praktik-praktik transaksional dan penguatan terhadap akuntabilitas bilamana dibutuhkan pelacakan kesesuaian konsultasi dengan pemecahan masalah yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan dan manfaat proyek perubahan telah mencapai target yang disusun diantaranya;

- a. Penyediaan alat pendukung pelayanan KOVI OTDA (OCULUS);
- b. Dukungan Komitmen Pejabat Lingkup Ditjen Otda dalam penggunaan KOVI OTDA sebagai salah satu alternatif layanan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. Penetapan Standar Alur Pelayanan KOVI OTDA;
- d. Penetapan Pemerintah Daerah percontohan sebagai langkah awal perluasan Implementasi penggunaan Aplikasi KOVI OTDA secara terintegrasi pada setiap layanan konsultasi urusan Pemerintah Daerah pada setiap level (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan Aplikasi.

Proyek perubahan ini telah berhasil menyelesaikan target kegiatan utama pada tahapan jangka pendek yang terdiri dari 8 *milestones*. Bahkan proyek perubahan ini telah berhasil melaksanakan kegiatan pada *milestones* 9 dan 10 yang merupakan target kegiatan pada tahapan jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk program jangka Panjang sebagaimana tertuang dalam *milestones* proyek perubahan ini *project leader* dan tim efektif berdasarkan arahan dan bimbingan Mentor pasca seminar proyek perubahan akan melanjutkan *milestones* pada tahapan jangka Panjang dengan memperhatikan kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada masa yang akan datang

4.2 REKOMENDASI

Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah yang dibangun merupakan langkah awal dalam meningkatkan pelayanan konsultasi tanpa harus bertatap muka sehingga berimplikasi dapat melakukan penghematan anggaran dalam belanja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti agar seluruh *milestones* proyek perubahan untuk jangka panjang dapat tercapai antara lain:

- a. Untuk keberlanjutan implementasi KOVI OTDA diperlukan dukungan anggaran untuk mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan KOVI OTDA termasuk di dalamnya perlu ada penguatan dan pembekalan kepada aparatur penyelenggaraan Pemerintahan di pusat dan daerah;
- b. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai salah satu alternatif layanan konsultasi dengan Pemerintah Pusat;
- c. Diperlukan komitmen bersama dalam pengembangan dan pengintegrasian KOVI OTDA dalam seluruh sistem layanan kepada Pemerintah Daerah oleh seluruh Direktorat di lingkup Ditjen Otda Kemendagri.

- d. Perlu ada penyusunan Keputusan Dirjen Otda yang memerintah kepada setiap komponen di lingkup Ditjen Otda membuat laporan yang berisi implementasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan KOVI OTDA sebagai layanan konsultasi per 6 (enam) bulan sekali dalam setiap tahun anggaran.

4.3 PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengerjaan proyek perubahan ini melibatkan pengembangan dalam potensi diri antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan analisis dalam mengidentifikasi kebutuhan atas pelayanan pemerintahan ditingkat pusat sebagai solusi untuk memecahkan persoalan panjangnya proses birokrasi di pemerintahan.
2. Meningkatnya kemampuan membangun kerja sama dan penanaman terhadap aparatur penyelenggara pemerintahan untuk mensukseskan reformasi birokrasi melalui pendekatan pelayanan berbasis pada kemudahan dan kecanggihan teknologi; dan
3. Meningkatnya kemampuan manajerial dalam mengorganisasikan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek perubahan yang disertai dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan (internal & eksternal) dalam melaksanakan program kerja organisasi, semangat kolaborasi dan harmonisasi dengan perangkat organisasi lain dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelaksanaan program menjadi salah satu instrumen keberhasilan. Semangat kolaborasi harus dibangun atas dasar kesepakatan dalam mencapai visi dan tujuan yang selaras. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap kelanjutan kolaborasi. Untuk itu penting untuk menjaga dimensi fundamental dalam membangun kolaborasi yakni keterbukaan masing-masing aktor yang terlibat, sehingga masing-masing kolaborator yang terlibat memiliki pandangan dan pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dari kolaborasi yang dilakukan.
4. Meningkatnya kepekaan dan analisa terhadap kebutuhan Pemetaan inovasi pelayanan yang diperlukan sebagai bagian dalam menumbuhkembangkan budaya cepat tanggap untuk melahirkan budaya kerja yang berbasis kinerja

sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya. Sehingga dalam rangka mensukseskan agenda tersebut otomatisasi berbagai peralatan dan mekanisme pelayanan, diperlukan sebuah sistem gabungan yang bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain dalam memecahkan masalah, dan memudahkan proses pelayanan, maupun penelusuran atas proses yang sedang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deng, H., Karunasena, K., & Xu, W. (2018). Evaluating the performance of e-government in developing countries: A public value perspective. *Internet Research*, 28(1), 169–190.
- Denhardt, J., & Denhardt, R. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Grindle, M. (2007). Good Enough Governance Revisited. *Development Policy Review*, Vol. 25, No. 4, 554 - 555.
- Haque, S., Memon, R., & Shaikh, A. (2013). E-Government using Grid Technology: Developing a Grid framework for G2G E-Communication and Collaboration System. *International Journal of Independent Research and Studies - IJIRS*, 2(1), 08–15.
- Kirat Rai, S., Ramamritham, K., & Jana, A. (2020). Identifying factors affecting the acceptance of government to government system in developing nations – empirical evidence from Nepal. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(2), 283–303.
- Modul Kepemimpinan Digital Tingkat II Tahun 2021
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Integritas Kepemimpinan
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Energi Kepemimpinan
- Northouse. (2004). *Leadership: Theory and Practice*. California: Sage Publications.
- Prasojo, E. (2012). *Dampak dan Masalah-Masalah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- R Yang, L., Elisa, N., & Eliot, N. (2019). Privacy and Security Aspects of E-Government in Smart Cities. In *Smart Cities Cybersecurity and Privacy* (pp. 89–102). Elsevier.
- Stogdill, R. (1993). *Leadership for the Twenty-First Century*. Westport: CT: Praeger.

LAMPIRAN

SK TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat telpon (021) 3453492
Website: <http://www.kemendagri.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
NOMOR 068.05-5561TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN
AKSELERASI PENGEMBANGAN APLIKASI KONSULTASI VIRTUAL
OTONOMI DAERAH

- Menimbang : a. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,
Bahwa untuk mengefektifkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa pandemi Covid19 maka perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital;
- b. bahwa konsultasi virtual melalui platform metaverse adalah bentuk terobosan penggunaan teknologi digital dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa konsultasi virtual dengan penggunaan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada huruf b diwujudkan dalam proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH TENTANG TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN AKSELERASI PENGEMBANGAN APLIKASI KONSULTASI VIRTUAL OTONOMI DAERAH
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Proyek Perubahan Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Proyek Perubahan Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Mentor;
 - b. Coach;
 - c. Project Leader;
 - d. Tim Efektif; dan
 - e. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas sebagaimana rincian tugas sebagai berikut:
- a. *Mentor*: pembimbing yang berlandaskan pada sikap profesionalisme, memberikan dukungan penuh dalam perancangan, memberikan persetujuan atas rancangan inovasi proyek perubahan, memantau dan memberikan timbal balik atas perkembangan proyek perubahan, dan menjadi inspirator bagi project leader untuk melakukan inovasi yang dilakukan.
 - b. *Coach*: sebagai konselor project leader dalam mengerjakan inovasi dan memberikan masukan yang konstruktif dalam pemetaan terhadap inovasi yang diberikan dan memberikan saran masukan bilamana terjadi kendala dalam aktualisasi saat menjalankan proyek perubahan dari *project leader*.
 - c. *Project Leader*: menyusun rancangan inovasi perubahan, mendelegasikan pembuatan laporan rancangan inovasi perubahan, menyelenggarakan kesepakatan dengan pemerintah daerah, memimpin eksekusi dan mengarahkan seluruh rencana

agenda proyek perubahan yang telah dirancang dengan pemetaan terhadap efisiensi dan efektivitas, serta melibatkan seluruh Direktorat di lingkup Ditjen Otda untuk mendukung terciptanya pelayanan konsultasi virtual yang terintegrasi.

d. Tim Efektif:

mendukung *project leader* dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pada proyek perubahan.

e. Tim Teknis:

mendukung *project leader* melakukan pengembangan terhadap aplikasi proyek perubahan yang sedang dijalankan.

KEEMPAT : masa kerja tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proyek perubahan Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2022

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
 TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN AKSELERASI PENGEMBANGAN APLIKASI
 KONSULTASI VIRTUAL OTONOMI DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si	Direktur Jenderal	<i>Mentor</i>
2.	Drs. Dody Ryadmadji, MM	Widyaiswara Ahli Utama	<i>Coach</i>
3.	Drs. Maddaremmeng, M.Si	Sekretaris Ditjen	<i>Project Leader</i>
Tim Efektif			
1.	Afif Amirullah, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Umum	Ketua
2.	Rully Hariyudha, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3.	Irma Yunita, SH, MH.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Pri Hutomo, S.SI, M.AP	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
5.	Amylia Rengganisa Samsudin, S.IP., M.AP	Kepala Subbag TU Pimpinan	Anggota
6.	M.Chadly Mutahali, S.ST, M.Si		
7.	Relsan Mandela, S.IP, MA	Analisis Kebijakan Ahli Pratama Subdit Provinsi Papua dan Papua Barat Ditjen Otonomi Daerah	Anggota
8.	Pandji Rakhawaly Fatahillah, S.STP	Sekretaris Pada Subbag TU Pimpinan	Anggota
9.	Amin El Kharis, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
Tim Teknis			
1.	Suryawan Hidayat, ST	Kepala Bagian Perencanaan	Ketua
2.	Sri Wahyuningsih Allif, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris
3.	Taufan Fernandes, S.STP	Analisis Tata Usaha Pada Subbag TU Dit. Fasilitas Kelembagaan, Kepegawaian, dan Perangkat Daerah	Anggota
4.	Syahnuri Hadyanah Bahary, S.STP, M.T.R.I.P	Analisis Data dan Informasi Pada Subdit Wilayah IV Dit. Fasilitas Kelembagaan, Kepegawaian, dan Perangkat Daerah	Anggota
5.	Novawan Aditya Ristara, S.IP	Sekretaris pada Subbag TU Dit Fasilitas Kelembagaan, Kepegawaian, dan Perangkat Daerah	Anggota

KERANGKA ACUAN KERJA

KAK
[KERANGKA ACUAN KERJA]



KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ESELON I / II : DIREKTORAT JENDRAL OTONOMI DAERAH
KEGIATAN : PEMBANGUNAN KOVI OTDA METAVERSE TAHUN
2022

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG	3
II. DASAR HUKUM	4
III. MAKSUD DAN TUJUAN	4
IV. TARGET / SASARAN	4
V. RUANG LINGKUP KEGIATAN	4
VI. TAHAPAN KEGIATAN	5
VII. HASIL PEKERJAAN	6
VIII. LOKASI KEGIATAN	6
IX. JANGKA WAKTU KEGIATAN	6
X. ANGGARAN KEGIATAN	6
XI. PELAPORAN	6
XII. SUMBER DAYA MANUSIA	7
XIII. KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA	8
XIV. PENUTUP	8

I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berjalannya waktu kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mulai berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu indikasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ditandai dengan banyaknya pengetahuan dan teknologi baru yang bisa di manfaatkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Manusia dan teknologi, merupakan dua kata yang tidak akan pernah memiliki ujung pembahasan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna selalu melakukan inovasi di segala bidang hanya untuk memudahkan aktivitas yang ada dalam kehidupannya. Termasuk juga inovasi dalam melakukan pengelolaan komunikasi yang berjalan semakin kompleks. Pekerjaan di kantor adalah contoh konkret dari sebuah komunikasi yang kompleks itu. Melibatkan banyak orang, baik itu pegawai internal maupun rekan bisnis (Pemda) sebagai pihak eksternal. Dibutuhkan adanya sistem informasi yang bisa menghubungkan kedua pihak tersebut agar dapat terus berkomunikasi. Jalan yang mudah ditempuh ialah komunikasi menggunakan internet karena kecanggihan teknologi yang satu ini bisa menembus seluruh kalangan kelas sosial di masyarakat, waktu bahkan batasan geografis. Kita rasakan juga sekarang di masa pandemi ini, semua mulai berubah. Sistem informasi berbasis internet mendadak menjadi sebuah trend, bisa kita lihat yang tadinya jarang atau bahkan tidak pernah kita melakukan rapat virtual/zoom meeting, sekarang zoom meeting merupakan hal yang biasa dan bahkan lebih kita gemari. Kemudian memperhatikan arahan Bapak Mendagri pada Sabtu, 22 Januari 2022 secara virtual dalam arahnya Beliau menyampaikan, untuk meminimalisir pertemuan secara langsung dengan orang-orang Daerah/Pemda karena hal tersebut sangat rentan menimbulkan praktek transaksional, maka dari itu inilah jawaban atau tindak lanjut kita terkait arahan bapak Mendagri tersebut, yaitu membuat sebuah Program Layanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.

II. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Layanan Konsultasi Virtual Kovi Otda Metaverse ini adalah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah adalah memfasilitasi Daerah untuk Konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda adalah agar:

1. Memberikan kemudahan berkomunikasi antara Ditjen OTDA dan Pemerintah Daerah.
2. Mempersempit ruang transaksional yang mungkin terjadi jika ada pertemuan langsung secara fisik.

IV. TARGET / SASARAN

Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memiliki manfaat bagi:

1. Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Adapun modul dan fitur yang dibutuhkan pada kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda, sebagai berikut :

1. Persiapan
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan pengumpulan data akses;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja tentang sitem;
 - c. Melakukan koordinasi dengan User tentang model/bentuk sistem;
2. Penyusunan
 - a. Inventarisasi data dan permasalahan dalam layanan konsultasi manual
 - b. Inventarisasi kebutuhan penggunaan layanann
 - c. Rancangan Layanan Konsultasi Virtual Kovi Otda

II. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Layanan Konsultasi Virtual Kovi Otda Metaverse ini adalah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah adalah memfasilitasi Daerah untuk Konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda adalah agar:

1. Memberikan kemudahan berkomunikasi antara Ditjen OTDA dan Pemerintah Daerah.
2. Mempersempit ruang transaksional yang mungkin terjadi jika ada pertemuan langsung secara fisik.

IV. TARGET / SASARAN

Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memiliki manfaat bagi:

1. Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Adapun modul dan fitur yang dibutuhkan pada kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda, sebagai berikut :

1. Persiapan
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan pengumpulan data akses;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja tentang sitem;
 - c. Melakukan koordinasi dengan User tentang model/bentuk sistem;
2. Penyusunan
 - a. Inventarisasi data dan permasalahan dalam layanan konsultasi manual
 - b. Inventarisasi kebutuhan penggunaan layanann
 - c. Rancangan Layanan Konsultasi Virtual Kovi Otda

3. Update dan Implementasi Aplikasi Kovi Otda

Pada tahap akan dikembangkan Layanan Konsultasi Virtual Kovi Otda, dengan integrasi ke api zoom.

Dalam pembangunan aplikasi ini paling tidak akan terdiri dari beberapa fungsi utama yaitu :

- a. Generate Meeting, untuk membuat secara otomatis jadwal meeting oleh setiap direktorat
- b. Jadwal Meeting, yang terdiri list jadwal meeting yang telah dibuat dan tersedia disetiap direktorat.
- c. Jadwal Konsultasi, yang terdiri dari list jadwal konsultasi yang telah dibuat antara user daerah dan pusan.

4. Pelaporan

- a. Pembuatan dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan
- b. Buku manual penggunaan aplikasi
- c. Video tutorial penggunaan aplikasi

VI. TAHAPAN KEGIATAN

Adapun tahapan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang harus dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yaitu:

1. Studi Kelayakan

- a. Perkiraan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan KAK (Kerangka Acuan Kerja).
- b. Pembuatan jadwal, pendefinisian *resource* yang dibutuhkan serta *output* yang dihasilkan selama proses kegiatan berlangsung.

2. Analisis dan Desain Sistem

- a. Pelaksanaan pengumpulan data yang dibutuhkan bagi pembangunan aplikasi kovi otda
- b. Pembuatan analisis kebutuhan diantaranya: analisis kebutuhan data, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan sistem, dan analisis proses bisnis
- c. Desain proses, data, dan antarmuka yang akan dibuat untuk aplikasi berdasarkan hasil analisis.
- d. Membangun spesifikasi fungsional *software* (*privileges* pengguna, fungsi dan alur sistem, arsitektur dan antarmuka) dengan desain antarmuka yang ergonomik.

3. Pengujian Sistem
 - a. *Review* kode program.
 - b. Tes kinerja aplikasi untuk menguji fungsionalitas aplikasi.
4. Implementasi
 - a. Update dan konfigurasi Aplikasi Kovi Otda pada *production server* di Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Pengujian akhir terhadap fungsionalitas aplikasi kovi otda pada *server production* sebelum digunakan

VII. HASIL PEKERJAAN

Adapun hasil atau *output* kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Direktorat Jendral Otonomi Daerah yaitu:

1. Aplikasi Kovi Otda, sesuai dengan ruang lingkup pada KAK (Kerangka Acuan Kerja).
2. Dokumentasi kegiatan yang dapat di detailkan pada rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan pelaksanaan pekerjaan
 - b. Buku manual penggunaan aplikasi
 - c. Video tutorial penggunaan aplikasi

VIII. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

IX. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda Tahun 2022 ini adalah 90 hari sejak kontrak ditandatangani.

X. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda adalah sebesar **Rp. 99.000.000,-** (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

XI. PELAPORAN

Pembuatan dokumen laporan oleh Penyedia Barang / Jasa adalah berdasarkan hasil dari setiap tahapan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda. Laporan yang diserahkan meliputi:

1. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan pelaksanaan pekerjaan berisi uraian analisis sistem, desain sistem, desain *database*, serta tampilan modul aplikasi yang telah dikembangkan pada aplikasi Kovi Otda.

2. Buku Manual Penggunaan Aplikasi

Buku ini berisi petunjuk penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan uraian dan gambar *capture* aplikasi agar mudah dipahami.

3. Video Tutorial Aplikasi

Video ini berisikan tutorial dan tata cara penggunaan aplikasi eperda pada modul yang dikembangkan

Laporan ini diserahkan kepada Pengguna Barang / Jasa paling lambat pada akhir masa kontrak.

XII. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Kovi Otda dilaksanakan dengan menggunakan jasa Konsultan. Adapun Tenaga Ahli bagi personil konsultan pihak ketiga yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Tenaga Ahli yang dibutuhkan adalah:

1. Team Leader sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) bidang Teknik Informatika/ Teknik Informatika/ Ilmu Komputer/ Ilmu Komunikasi / Sistem Informasi dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
2. Tenaga Ahli Programmer sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) Bidang Manajemen Informatika/ Teknik Informatika/ Ilmu Komputer/ Ilmu Komunikasi / Sistem Informasi, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
3. Tenaga Ahli Web Designer sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) Bidang Manajemen Informatika/ Teknik Informatika/ Ilmu Komputer/ Ilmu Komunikasi/ Sistem Informasi, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
4. Tenaga Ahli Database sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) Bidang Manajemen

Informatika/ Teknik Informatika/ Ilmu Komputer/ Ilmu Komunikasi / Sistem Informasi, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.

5. Tenaga Ahli Jaringan sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan terakhir minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) Bidang Manajemen Informatika/ Teknik Informatika/ Ilmu Komputer/ Ilmu Komunikasi / Sistem Informasi, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Tenaga pendukung yang dibutuhkan:

1. Administrasi sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan terakhir minimal Diploma III (D3) dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
2. Operator aplikasi sebanyak 1 (dua orang, pendidikan terakhir minimal Diploma III (D3) Teknik Informatika, system informasi, ataupun Ilmu Komunikasi dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun

XIII. KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA

Kewajiban pemberi jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, perkiraan ruang lingkup pekerjaan, dan penjadwalan pendampingan.
2. Mengkoordinasikan dan menjamin bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan metode, prosedur, volume pekerjaan, tata waktu, dan petunjuk-petunjuk yang disepakati bersama.
3. Mengantisipasi dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan.
4. Melakukan kendali mutu untuk seluruh rangkaian pekerjaan.

Tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi segala sesuatu yang diperolehnya dari dan atau selama pekerjaan dilaksanakan kepada siapapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direktorat Produk Hukum Daerah maupun Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Ketentuan ini berlaku seterusnya dan tidak terbatas dengan berakhirnya pekerjaan, apapun alasannya.

XIV. PENUTUP

Hal yang mendasar dalam pengembangan sistem/ aplikasi di pemerintahan adalah operasionalnya sistem/ aplikasi. Hal tersebut dapat diraih dengan menerapkan pendekatan:

1. *User friendly* dan ergonomik dari segi desain aplikasi.

2. Dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Dapat memberikan manfaat, nilai tambah, dan *feed back* bagi pengguna.
4. Memenuhi spesifikasi aplikasi.

Keempat hal tersebut kami jadikan sebagai pegangan dalam kegiatan Pembangunan Aplikasi Kovi Otda, sehingga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah khususnya, serta Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait pada umumnya.

Pemberitahuan Kepada Pemda Terkait Penggunaan Kovi Otda



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Oktober 2022

Nomor : 067/6483/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Aplikasi Layanan
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah
Metaverse (KOVI OTDA METAVERSE)
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

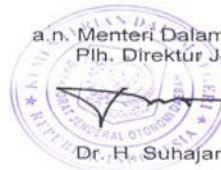
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/ Walikota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mengurangi pertemuan langsung secara fisik dalam rangka meminimalisir Praktek Transaksional dan dalam rangka mewujudkan sistem Pemerintahan yang transparan, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mendukung proses percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik di Era Society 5.0, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah membuat Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah berbasis Metaverse (KOVI OTDA METAVERSE) yang ditujukan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. Adapun layanan Konsultasi Virtual Ditjen Otonomi Daerah dibuka setiap hari Kerja mulai dari Pukul 09.00-15.30 WIB dengan terlebih dahulu mendaftar di alamat website <http://koviotda.kemendagri.go.id>.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan para Gubernur dan Bupati/Walikota agar menyampaikan informasi ini ke Perangkat Daerahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Pih. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Penetapan Standar Alur Pelayanan Kovi Otda

**JOIN
GROUP
WHATSAPP**



<https://bit.ly/KoviOtdaGroup>

Registrasi Kovi Otda

Link Pendaftaran

<http://koviotda.kemendagri.go.id/>

Panduan Pendaftaran Kovi Otda



Step 1

Setelah Mengunjungi
Laman Website Kovi
Otda, Silahkan Klik
"Don't Have an
Account?"

KOVI OTDA

Email

Password

[Log in](#)

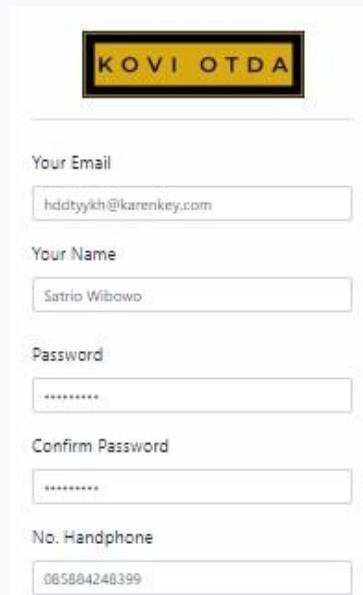
[Don't have an account?](#) [Reset Password](#)

Created by lBe



Step 2

Silahkan Isi Data
Sesuai dengan
Perangkat Daerah
Masing -Masing



KOVI OTDA

Your Email

Your Name

Password

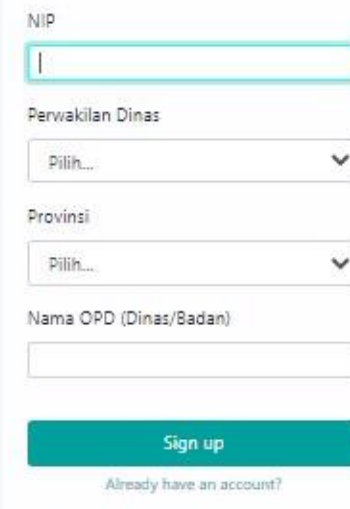
Confirm Password

No. Handphone



Step 3

Setelah Data sudah
Lengkap, Kemudian Klik
Tombol 'Sign Up'



NIP

Perwakilan Dinas

Provinsi

Nama OPD (Dinas/Badan)

[Sign up](#)

[Already have an account?](#)

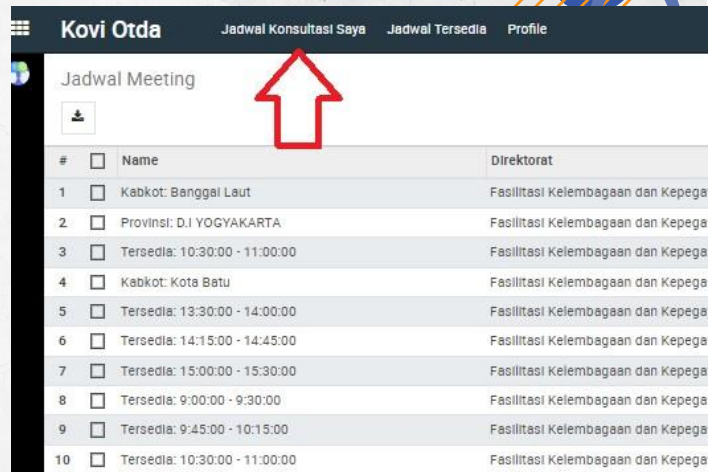


Step 4

Setelah Sign Up, Sobat Kovi akan di direct langsung ke Laman Dashboard,

Keterangan:

User baru dapat membuat jadwal setelah akun di approve oleh Admin Kovi Otda



Kovi Otda Jadwal Konsultasi Saya Jadwal Tersedia Profile

Jadwal Meeting

#	<input type="checkbox"/>	Name	Direktorat
1	<input type="checkbox"/>	Kabkot: Banggai Laut	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepeg
2	<input type="checkbox"/>	Provinsi: DJ YOGYAKARTA	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepeg
3	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 10:30:00 - 11:00:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
4	<input type="checkbox"/>	Kabkot: Kota Batu	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
5	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 13:30:00 - 14:00:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
6	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 14:15:00 - 14:45:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
7	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 15:00:00 - 15:30:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
8	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 9:00:00 - 9:30:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
9	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 9:45:00 - 10:15:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg
10	<input type="checkbox"/>	Tersedia: 10:30:00 - 11:00:00	Fasilltasi Kelembagaan dan Kepeg

Step 5

Kemudian, Klik Tombol 'Create' Untuk Membuat Jadwal Konsultasi



Step 6



Keterangan Isi :

1. Perihal diisi terkait dengan tujuan konsultasi

Perihal 1

Detail 2

Direktorat Tujuan

Tanggal

Pilih Jadwal

Mulai

Selesai

Note

Permasalahan 2

Kabkot: Banggai Laut

Provinsi: D.I.YOGYAKARTA

Tersedia: 10:30:00 - 11:00:00

Kabkot: Kota Batu

Tersedia: 13:30:00 - 14:00:00

Tersedia: 14:15:00 - 14:45:00

Tersedia: 15:00:00 - 15:30:00

Search More...

Step 7



Keterangan Isi :

2. Detail di isi sesuai dengan **Direktorat Tujuan**, dan **Jadwal** yang di inginkan

Perihal 1

Detail 2

Direktorat Tujuan

Tanggal

Pilih Jadwal

Mulai

Selesai

Note

Permasalahan 3

Kabkot: Banggai Laut

Provinsi: D.I.YOGYAKARTA

Tersedia: 10:30:00 - 11:00:00

Kabkot: Kota Batu

Tersedia: 13:30:00 - 14:00:00

Tersedia: 14:15:00 - 14:45:00

Tersedia: 15:00:00 - 15:30:00

Search More...

Step 8



Keterangan Isi :

3. Permasalahan di isi sesuai dengan perihal konsultasi

Perihal 1

Detail 2

Direktorat Tujuan

Tanggal

Pilih Jadwal

Mulai Selesai

Note

Permasalahan 3

Kabkot: Banggai Laut

Provinsi: D.I YOGYAKARTA

Tersedia: 10:30:00 - 11:00:00

Kabkot: Kota Batu

Tersedia: 13:30:00 - 14:00:00

Tersedia: 14:15:00 - 14:45:00

Tersedia: 15:00:00 - 15:30:00

Search More...

Step 9



Kemudian, Klik Tombol "Save" dibagian Kiri atas

Kovi Otda

Jadwal Konsultasi Saya

Jadwal Tersedia

Profile

Jadwal Konsultasi / New

Save Discard

Perihal

Detail

Direktorat Tujuan

Tanggal

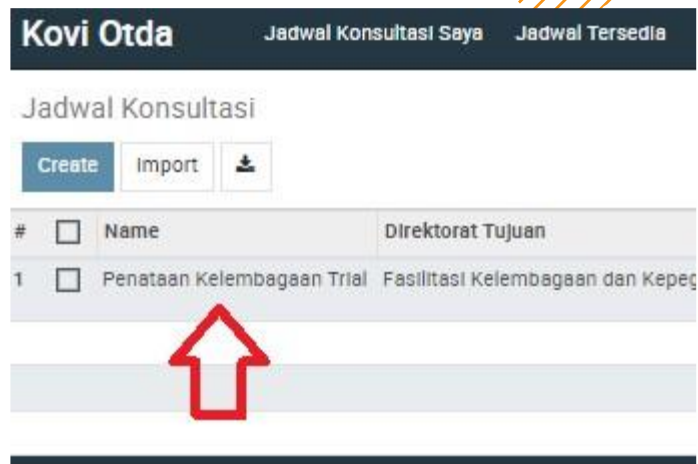
Pilih Jadwal

Mulai

Selesai

Step 10

Lalu, Anda Dapat Melihat Jadwal Konsultasi yang telah dibuat pada Menu "*Jadwal Konsultasi Saya*"



Kovi Otda Jadwal Konsultasi Saya Jadwal Tersedia

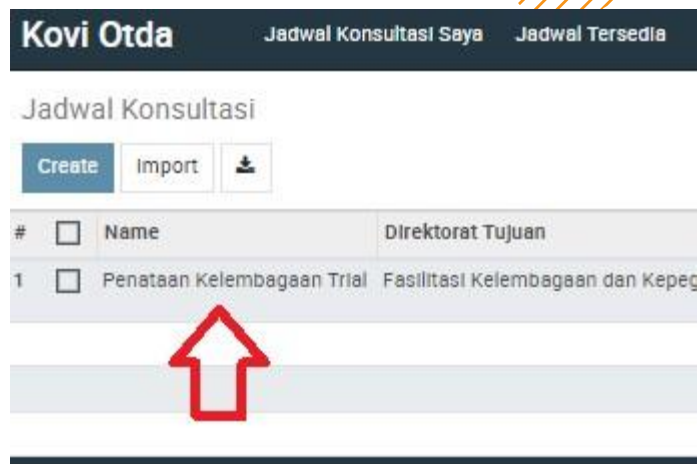
Jadwal Konsultasi

Create Import

#	Name	Direktorat Tujuan
1	Penataan Kelembagaan Trial	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepeg...

Step 11

Utuk Melihat Jadwal Konsultasi "Detail" yang telah dibuat anda bisa Klik seperti gambar berikut



Kovi Otda Jadwal Konsultasi Saya Jadwal Tersedia

Jadwal Konsultasi

Create Import

#	Name	Direktorat Tujuan
1	Penataan Kelembagaan Trial	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepeg...

Step 12



Setelah Jadwal Konsultasi tiba, anda dapat Klik Join Meeting pada Tombol "Join Meeting" untuk terhubung ke Zoom Meeting

Penataan Kelembagaan Trial

Detail

Direktorat Tujuan	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawalan Perangkat Daerah
Tanggal	11/17/2022
Pilih Jadwal	Provinsi: DKI JAKARTA
Mulai	11/17/2022 14:15:00
Selesai	11/17/2022 14:45:00
Link Konsultasi	https://us02web.zoom.us/j/84661659...

[Join Meeting](#)

Note

Permasalahan pemetaan kembali urusan pemerintahan

Step 13



Kemudian Setelah Anda Klik Link yang ada, anda akan di direct ke halaman zoom untuk terkoneksi melalui Zoom dengan Pilih Tombol "Open Zoom Meetings "

us02web.zoom.us/j/84661659210?pwd=Q0hQNGpLOGFwTEczQWVlYU1laEpRQT09#success

Zoom

Open Zoom Meetings?
https://us02web.zoom.us wants to open this application.
 Always allow us02web.zoom.us to open links of this type in the associated app

[Open Zoom Meetings](#) [Cancel](#)

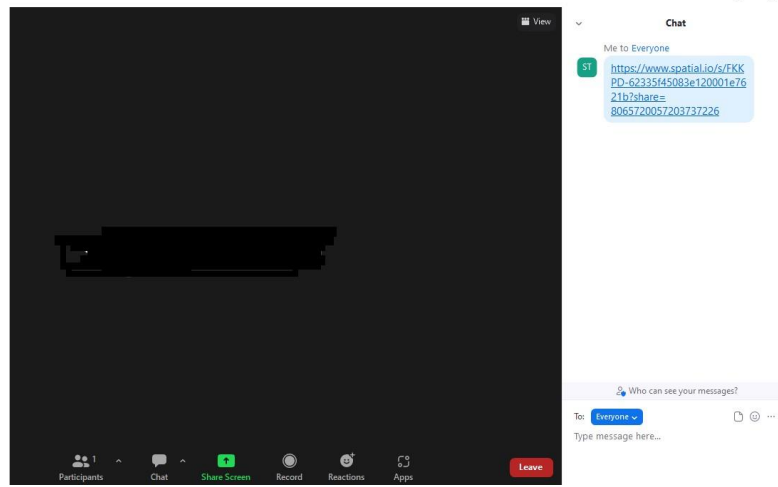
Click **Open Zoom Meetings** on the dialog shown by your browser
If you don't see a dialog, click **Launch Meeting** below

By joining a meeting, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Statement](#)

[Launch Meeting](#)

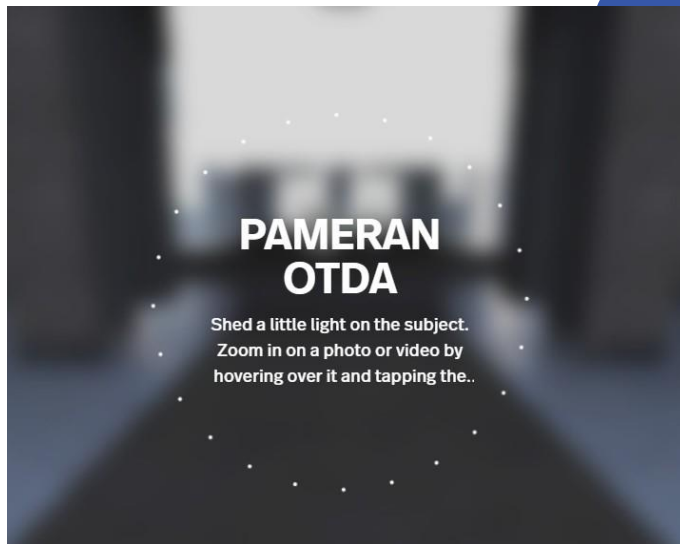
Step 14

Setelah Zoom Terbuka, Klik Tombol "Chat" pada bagian menu dibawah ini sebagai berikut, Klik Link yang ada didalamnya untuk Pindah ke ruang "Metaverse "



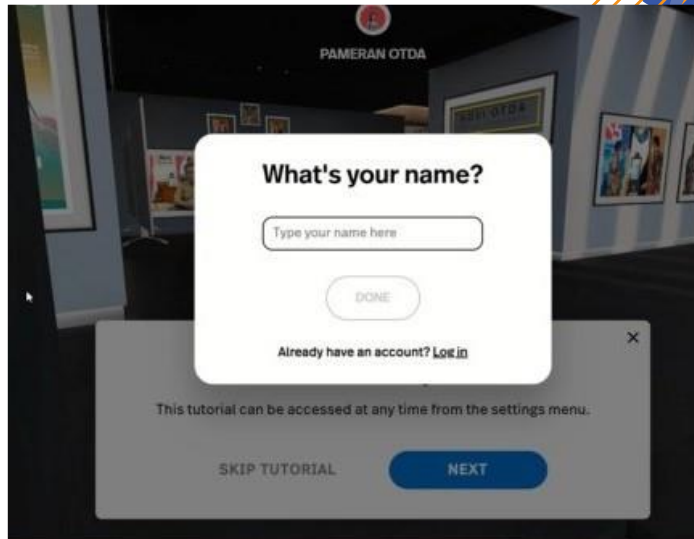
Step 16

Setelah Sobat Kovi, Klik link Metaverse tersebut, akan masuk ke Dalam Ruang Metaverse , tunggu hingga beberapa menit loading...



Step 16

Masukan Username sesuai dengan Nama Pribadi (Perangkat Daerah) , Kemudian Klik "DONE"



Selamat Datang di Metaverse



DUKUNGAN DIRJEN DAN DIREKTUR LINGKUP DITJEN OTDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3453492
Faksimile (021)3453492 www.Kemendagri.go.id,

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr.Drs. Akmal Malik, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3453492
Faksimile (021)3453492 www.Kemendagri.go.id.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2914/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si
Jabatan : Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus &
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.


Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3453402
Faksimile (021)3453402 www.Kemendagri.go.id,

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2913/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME
Jabatan : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian
Perangkat Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dr. Cheka Virgowansyah, S,STP, ME



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3463492
Faksimile (021)3463492 www.Kemendagri.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2915/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Andi Bataralifu, M.Si
Jabatan : Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Drs. Andi Bataralifu, M.Si



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3453492
Faksimile (021)3453492 www.Kemendagri.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2916/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.SI
Jabatan : Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremeng, M.SI
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.Si



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta, Telepon (021)3463492
Faksimile (021)3463492 www.Kemendagri.go.id.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 100.2.7/2917/OTDA

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Makmur Marbun, M.Si
Jabatan : Direktur Produk Hukum Daerah

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Drs.Maddaremmeng, M.Si
Jabatan : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Judul : Akselerasi Pengembangan Aplikasi Konsultasi
Virtual Otonomi Daerah Pengembangan Aplikasi
Konsultasi Virtual Otonomi Daerah

Dengan harapan Proyek Perubahan ini dapat terealisasi secara menyeluruh pada lingkup Ditjen Otda mulai tahun anggaran 2023 untuk memberikan pelayanan konsultasi berbasis *metaverse* kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Produk Hukum Daerah.


Drs. Makmur Marbun, M.Si

NOTA DINAS LAPORAN SOSIALIASI DAN PEMILIHAN KOTA MAKASSAR



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
Faksimile (021) 34833648, www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dari : Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Tanggal : 21 November 2022
Nomor : 1175/S¹ET/XI/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Rapat Sosialisasi dan Ujicoba Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah berbasis Metaverse di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti hasil rapat Sosialisasi dan Ujicoba Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah berbasis Metaverse berdasarkan Surat Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2/8277/OTDA Hal Undangan tanggal 17 November 2022, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pertemuan dengan agenda Sosialisasi dan Ujicoba Pengembangan Aplikasi Konsultasi Virtual Otonomi Daerah berbasis Metaverse, pada tanggal 19 November 2022, bertempat di Gammara Hotel Makassar.
2. Pertemuan tersebut dipimpin oleh **Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah**, dan dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Kota Makassar :
 - Kepala Dinas Kominfo;
 - Sekretaris DPRD;
 - Perwakilan Balitbangda;
 - Perwakilan Bappeda;
 - Perwakilan BKPSDM;
 - Perwakilan Bag Hukum; dan
 - Perwakilan Bag Tata Pemerintahan.
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :
 - Perwakilan Badan Kepegawaian Daerah;
 - Perwakilan Biro Pemerintahan;
 - Perwakilan Biro Organisasi; dan
 - Perwakilan Biro Hukum.
3. Pada pertemuan tersebut dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya mendukung penyelenggaraan KOVI OTDA berbasis metaverse, dan kondisi existing Kota Makassar sedang dalam tahap pengembangan Kota Metaverse dengan penguatan sarana dan prasarana pendukung diantaranya:
 - Penguatan koneksi jaringan 5G
 - Pengadaan *Oculus* untuk Tahun Anggaran 2023

- Penyiapan tempat khusus yang dapat mengakses layanan berbasis metaverse dan sebagainya.
- b. Penggunaan layanan pemerintahan berbasis metaverse alah satunya dapat berwujud pada konsultasi virtual harus menjamin keamanan data tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas.
- c. Perlu ada pelatihan secara menyeluruh kepada ASN penyelenggara Pemerintahan baik ditingkat Pusat dan Daerah untuk memahami mekanisme kerja layanan berbasis metaverse secara berkala. Sehingga jika dibutuhkan perlu membuat kesatuan tim ahli penggunaan metaverse yang melekat pada masing-masing komponen dalam tahap awal pengembangan dan pembiasaan penggunaan metaverse dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- d. Diperlukan pengaturan teknis untuk mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikonsultasikan secara virtual, lebih lanjut kaitannya dengan KOVI OTDA bahwa perlu ada pengaturan dalam menjelaskan mekanisme pengesahan dokumen apakah dapat dilakukan di dalam fitur layanan berbasis metaverse yang ditawarkan.
- e. Pemerintah Daerah yang akan berkonsultasi secara langsung ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah akan diarahkan untuk menggunakan ruang metaverse yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah,



Drs. Maddaremmeng, M.Si